



RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA

- 1. PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.**
(TANGGAL, 12 NOVEMBER 2025)
- 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026.**
(TANGGAL, 26 NOVEMBER 2025)

**DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2025**



RISALAH

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA**

**PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

**PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TANGGAL 12 NOVEMBER 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

I. Waktu dan Tempat :

Hari : Rabu.
Tanggal : 12 November 2025.
Waktu : 13.00 Wib s.d 15.00 Wih
Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Acara : Dalam Rangka Penyampaian Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

II. Jenis Rapat : Rapat Paripurna

III. Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum

IV. Acara Rapat : 1. Pembukaan.
2. Penyampaian Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Lampung Selatan.
4. Tanggapan/ Jawaban Bupati Lampung Selatan

V. Peserta Rapat :

1. Duduk di Kursi Pimpinan :
- Ketua DPRD Kab. Lam-Sel : ERMA YUSNELI, S.E., M.M.
- Wakil Ketua DPRD Kab. Lam-Sel : - MERIK HAVIT, S.H., M.H.
- A. BENNY RAHARJO, S.H.
- BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A.
- Wakil Bupati Lampung Selatan : M. SYAIFUL ANWAR, S.T., M.Pd.

Duduk disamping/belakang Pimpinan :

- Plt. Sekretaris DPRD : ACHMAD HERRY, S.E., M.M.
- Kabag Fasilitasi & PP : SUSILO HADI, S.Sos
- Kabag Program dan Keuangan : LULUK TANTRI ELVANDARI, S.H., M.M.

2. Anggota Dewan yang hadir :

- Fraksi Gerindra : 8 orang
- Fraksi PDI Perjuangan : 8 orang
- Fraksi Golkar : 6 orang
- Fraksi PAN : -
- Fraksi PKB : 6 orang
- Fraksi Demokrat : 4 orang
- Fraksi NasDem : 2 orang
- Fraksi PKS : 3 orang
JUMLAH : 37 orang

3. Anggota Dewan yang tidak hadir :
- Fraksi Gerindra : FARIZAL PURBA, S.E. (Izin)
 - Fraksi Golkar : SYAIFUL AZUMAR, S.H., M.H. (sakit)
 - Fraksi PAN : - BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A. (Izin)
- AGUS SARTONO, S.E. (Izin)
- BAYU PRASETYA, S.E. (Izin)
- WIDODO (Izin)
- EDY WALUYO, S.T. (Izin)
- Hj. RUSDIANTI (Izin)
 - Fraksi Demokrat : KODRI (Izin)
 - Fraksi NasDem : - M. GILANG SATRIA RIYANDI, SE., MM (Izin)
- SUHADIRIN (Izin)
- YULIDA NANDAR LAILA (Izin)
 - Fraksi PKS : KASMANI, S.T., M.Si (Izin)
4. Undangan yang hadir :
- Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan
 - Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setdakab, Inspektur dan Para Kabag Setdakab Lampung Selatan.
 - Para Kepala Dinas/ Kepala Badan dan para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
 - Ormas, Insan Pers baik Cetak maupun Elektronik.

VI. JALANYA RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SYALOM, OHM SWASTIASTU, NAMO BUDAYA, SALAM KEBAJIKAN, TABIK PUUN.....

SEBELUM RAPAT PARIPURNA HARI INI DIBUKA SECARA RESMI, GUNA MENANAMKAN RASA KEBANGSAAN MARILAH KITA IKUTI BERSAMA LAGU INDONESIA RAYA DAN DILANJUTKAN MARS LAMPUNG SELATAN, KEPADA PARA HADIRIN DIMOHON UNTUK BERDIRI, DIPERSILAHKAN.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MARS LAMPUNG SELATAN).

2. PIMPINAN RAPAT.

TERIMA KASIH, HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

UNTUK SELANJUTNYA SESUAI DENGAN TATA TERTIB DPRD KAB. LAM-SEL, KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH. DAN MEMBACAKAN SURAT MASUK YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, DIPERSILAHKAN

PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH, DAN SURAT-SURAT MASUK)

3. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH. DAN SURAT MASUK YANG BERKAITAN DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SAAT INI TELAH HADIR **37** ORANG ANGGOTA DEWAN YTH, DENGAN DEMIKIAN QOURUM RAPAT PARIPURNA TELAH TERPENUHI, MAKA DENGAN MENGUCAP, "**BISMILLAHIR ROHMANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, MASA PERSIDANGAN KE-TIGA RAPAT KE 22 TAHUN SIDANG 2025, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

RAPAT SECARA RESMI DIBUKA DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.

-----**KETUKAN PALU 3 KALI**-----

- YTH. SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN.
- YTH. SDR. WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN.
- YTH. SDR. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YTH.
- YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, SEKDAKAB SERTA PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, INSPEKTUR, PARA KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- SDR. ALIANSI LAMPUNG SELATAN BERSATU, INSAN PERS, HADIRIN PARA UNDANGAN YANG KAMI MULYAKAN.

MENGAWALI PERTEMUAN DALAM RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA KITA DAPAT MENJALANKAN SEGALA AKTIFITAS DAN BERKUMPUL BERSAMA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DISEBUTKAN BAHWA, KEPALA DAERAH WAJIB MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DISERTAI PENJELASAN DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA KEPADA DPRD, SESUAI DENGAN WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH KETENTUAN PERUNDANGAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA, SECARA TEKNIS PENYUSUNAN RAPBD DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEJALAN DENGAN ITU, PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 BERPEDOMAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026, SERTA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) TAHUN 2026 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERSEBUT DILAKUKAN SECARA TERTIB, EFESIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN AZAS Keadilan, Kepatutan, Aspiratif dan Bermanfaat untuk kepentingan publik. UNTUK ITU BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TELAH MELAKSANAKAN RAPAT PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2025 ANTARA LAIN MENETAPKAN JADWAL PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DENGAN SUSUNAN ACARA RAPAT SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN.
2. PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 OLEH SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN.
3. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD.
4. JAWABAN / TANGGAPAN, BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
5. SKORS RAPAT.

DEMI MUSYAWARAH MUFAKAT APAKAH SUSUNAN ACARA TERSEBUT DAPAT DISETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

PARIPURNA DEWAN, YTH.
YTH. SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN
PARA HADIRIN, UNDANGAN YANG KAMI MULYAKAN.

ACARA YANG KE-DUA YAITU PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, OLEH SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN. KEPADA SDR. BUPATI, DIPERSILAHKAN.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

(PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026)

4. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, SEHINGGA AKAN DIJADIKAN BAHAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

ACARA YANG KE-TIGA YAITU PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

DEMI TERTIBNYA ACARA PENYAMPAIAN INI KAMI PERSILAHKAN KEPADA MASING-MASING FRAKSI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SECARA BERURUTAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI NYA YAITU :

- | | |
|-------------------------|---|
| - FRAKSI GERINDRA | SDR, DWI RIYANTO, S.E., M.M. |
| - FRAKSI PDI-PERJUANGAN | SDR, SAMSUL H SUHARTONO |
| - FRAKSI GOLKAR | SDR, H. SIDIK MARYANTO, S.Sos |
| - FRAKSI P A N | SDR, (IZIN/ DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS). |
| - FRAKSI PKB | SDR, ISMAIL |
| - FRAKSI DEMOKRAT | SDR, FITRI PURWANTI, S.T., M.T. |
| - FRAKSI NASDEM | SDR, POLMAN SINAGA, S.H. |
| - FRAKSI P K S | SDR, H. BOWO EDY ANGGORO, S.E. |

FRAKSI-FRAKSI

(MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA)

5. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YTH YANG TELAH MEWAKILI MASING-MASING FRAKSINYA DALAM MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026,

SEHINGGA TERDAPAT BEBERAPA CATATAN, SARAN DAN REKOMENDASI DALAM MENGKRITISI PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026, HAL TERSEBUT DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMPERJUANGKAN DAN MEMFASILITASI ASPIRASI MASYARAKAT YANG PADA GILIRANNYA UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

ACARA YANG KE-EMPAT YAITU JAWABAN/TANGGAPAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KEPADA SDR. BUPATI DIPERSILAHKAN.

WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN
(MENYAMPAIKAN TANGGAPANNYA)

6. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/JAWABANNYA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, UNTUK SELANJUTNYA RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 TERSEBUT AKAN DIBAHAS LEBIH MENDETAIL OLEH BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

DENGAN DEMIKIAN MAKA SELESAILAH ACARA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 PADA HARI INI.

SEBELUM MENGAKHIRI RAPAT PARIPURNA INI, TIDAK LUPA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN BESERTA JAJARANNYA, ANGGOTA FORKOPIMDA, PARA UNDANGAN DAN INSAN PERS YANG TELAH MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PADA HARI INI, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP, "**ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. **RAPAT SECARA RESMI DISKORS**, DAN AKAN DILANJUTKAN DALAM RAPAT YANG AKAN DATANG.

-----KETUKAN PALU 2 KALI-----

**TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,
BILLAHITAUFIQ WAL-HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

VII. PENUTUP

Demikian Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kalianda, 12 November 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ERMA YUSNELI, S.E., M.M.

PIA SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ACHMAD HERRY, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19711230 200003 1 002



PANDUAN ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

RABU, 12 NOVEMBER 2025

1. PIMPINAN RAPAT

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA, SYALOM, OHM SWASTIASTU, NAMO BUDAYA,
SALAM KEBAJIKAN, TABIK PUUN.....**

SEBELUM RAPAT PARIPURNA HARI INI DIBUKA SECARA RESMI,
GUNA MENANAMKAN RASA KEBANGSAAN MARILAH KITA IKUTI
BERSAMA LAGU INDONESIA RAYA DAN DILANJUTKAN MARS
LAMPUNG SELATAN, KEPADA PARA HADIRIN DIMOHON UNTUK
BERDIRI, DIPERSILAHKAN.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MARS LAMPUNG
SELATAN).

2. PIMPINAN RAPAT.

TERIMA KASIH, HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.
UNTUK SELANJUTNYA SESUAI DENGAN TATA TERTIB DPRD KAB.
LAM-SEL, KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS
DEWAN UNTUK MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA
DEWAN YTH. DAN MEMBACAKAN SURAT MASUK YANG
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA PADA
HARI INI, DIPERSILAHKAN



PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH, DAN
SURAT-SURAT MASUK)

3. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. SEKRETARIS DEWAN
YANG TELAH MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA
DEWAN YTH. DAN SURAT MASUK YANG BERKAITAN DENGAN
ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SAAT INI
TELAH HADIR³⁷..... ORANG ANGGOTA DEWAN YTH,
DENGAN DEMIKIAN QOURUM RAPAT PARIPURNA TELAH
TERPENUHI, MAKA DENGAN MENGUCAP, "**BISMILLAHIR
ROHMANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN, MASA PERSIDANGAN KE-TIGA RAPAT KE
22 TAHUN SIDANG 2025, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

**RAPAT SECARA RESMI DIBUKA DAN DINYATAKAN
TERBUKA UNTUK UMUM.**

-----**KETUKAN PALU 3 KALI**-----

- YTH. SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN.
- YTH. SDR. WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN.
- YTH. SDR. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YTH.
- YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN, SEKDAKAB SERTA PARA STAF AHLI
BUPATI, PARA ASISTEN, INSPEKTUR, PARA
KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- SDR. ALIANSI LAMPUNG SELATAN BERSATU, INSAN
PERS, HADIRIN PARA UNDANGAN YANG KAMI
MULYAKAN.



MENGAWALI PERTEMUAN DALAM RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, MARILAH KITA SENANTIASA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA KITA DAPAT MENJALANKAN SEGALA AKTIFITAS DAN BERKUMPUL BERSAMA MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA DEWAN PADA HARI INI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 DISEBUTKAN BAHWA, KEPALA DAERAH WAJIB MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DISERTAI PENJELASAN DAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA KEPADA DPRD, SESUAI DENGAN WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH KETENTUAN PERUNDANGAN UNTUK MEMPEROLEH PERSETUJUAN BERSAMA, SECARA TEKNIS PENYUSUNAN RAPBD DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SEJALAN DENGAN ITU, PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 BERPEDOMAN PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026, SERTA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) TAHUN 2026 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERSEBUT DILAKUKAN SECARA TERTIB, EFESIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB DENGAN MEMPERHATIKAN AZAS Keadilan, Kepatutan, Aspiratif dan



BERMANFAAT UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK. UNTUK ITU BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TELAH MELAKSANAKAN RAPAT PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2025 ANTARA LAIN MENETAPKAN JADWAL PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DENGAN SUSUNAN ACARA RAPAT SBB :

1. PEMBUKAAN.
2. PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 OLEH SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN.
3. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD.
4. JAWABAN / TANGGAPAN, BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
5. SKORS RAPAT.

DEMI MUSYAWARAH MUFAKAT APAKAH SUSUNAN ACARA TERSEBUT DAPAT DISETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

PARIPURNA DEWAN, YTH.
YTH. SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN
PARA HADIRIN, UNDANGAN YANG KAMI MULYAKAN.

ACARA YANG KE-DUA YAITU PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, OLEH SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN. KEPADA SDR. BUPATI, DIPERSILAHKAN.

BUPATI LAMPUNG SELATAN
(PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026)

**4. PIMPINAN RAPAT**

TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, SEHINGGA AKAN DIJADIKAN BAHAN KAJIAN DAN PEMBAHASAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

ACARA YANG KE-TIGA YAITU PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

DEMI TERTIBNYA ACARA PENYAMPAIAN INI KAMI PERSILAHKAN KEPADA MASING-MASING FRAKSI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SECARA BERURUTAN UNTUK MENYAMPAIKAN PENDAPAT FRAKSI NYA YAITU :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - FRAKSI GERINDRA | SDR, Dwi Riyanto, S.NM |
| - FRAKSI PDI-PERJUANGAN | SDR, Samsul H. Suhartono |
| - FRAKSI GOLKAR | SDR, H. Sidik Maryanto, S.Sos |
| - FRAKSI P A N | SDR, Izm, Disampaikan tertulis |
| - FRAKSI PKB | SDR, ISMAIL |
| - FRAKSI DEMOKRAT | SDR, Fitri Purwanti, ST.MT |
| - FRAKSI NASDEM | SDR, PALMAN SINAGA, SH |
| - FRAKSI P K S | SDR, H. BOWO EDY ANGGORO, SE |

FRAKSI-FRAKSI

(MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSINYA)

5. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA REKAN-REKAN ANGGOTA DEWAN YTH YANG TELAH MEWAKILI MASING-MASING FRAKSINYA DALAM MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026,



SEHINGGA TERDAPAT BEBERAPA CATATAN, SARAN DAN REKOMENDASI DALAM MENGKRITISI PENYUSUNAN APBD T.A. 2026, HAL TERSEBUT DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMPERJUANGKAN DAN MEMFASILITASI ASPIRASI MASYARAKAT YANG PADA GILIRANNYA UNTUK MENDORONG PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

ACARA YANG KE-EMPAT YAITU JAWABAN/TANGGAPAN BUPATI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, KEPADA SDR. BUPATI DIPERSILAHKAN.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

(MENYAMPAIKAN TANGGAPANNYA)

6. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN TANGGAPAN/JAWABANNYA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, UNTUK SELANJUTNYA RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 TERSEBUT AKAN DIBAHAS LEBIH MENDETAIL OLEH BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

DENGAN DEMIKIAN MAKA SELESAILAH ACARA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026 PADA HARI INI.

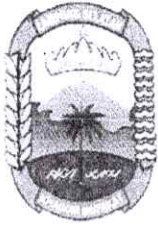


SEBELUM MENGAKHIRI RAPAT PARIPURNA INI, TIDAK LUPA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN BESERTA JAJARANNYA, ANGGOTA FORKOPIMDA, PARA UNDANGAN DAN INSAN PERS YANG TELAH MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PADA HARI INI, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP, "**ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PENYAMPAIAN RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. **RAPAT SECARA RESMI DISKORS,** DAN AKAN DILANJUTKAN DALAM RAPAT YANG AKAN DATANG.

-----**KETUKAN PALU 2 KALI**-----

**TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,
BILLAHITAUFIQ WAL-HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

**MOHON IZIN BAPAK BUPATI DAN BAPAK WAKIL BUPATI
PIMPINAN DEWAN DAN PARIPURNA DEWAN YTH.**

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA HARI INI
RABU, TANGGAL 12 NOVEMBER 2025, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA
APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH DAN
SURAT-SURAT MASUK SBB:

DARI JUMLAH **50** ANGGOTA DEWAN YTH.
TELAH HADIR SEBANYAK **37** ORANG, DENGAN RINCIAN SBB :

TIDAK HADIR **13** ORANG.

KETERANGAN TIDAK HADIR:

SAKIT	:..... 1ORANG
IZIN	:..... 12ORANG
DIPERJALANAN!	:.....ORANG
TANPA KET.	:.....ORANG

ADAPUN SURAT MASUK ADALAH:

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

RAHASIA ☐ PENTING ☐ RUTIN ☐

Indek : Kode :

Perihal/ Isi Ringkas : Penyampaian rancangan APBD
TA 2026

Tgl. No. Surat : 12 Sept 2025 / 900 / 6458 / V.03 / 2025

Asal : Sekda

Tgl. / No. Agenda : 12 Sept 2025 / 605.a

Instruksi / Informasi *)

Diteruskan Kepada :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SDR Sepwan - ALB
agendakan minggu
ke II Bln Oktober
25-Sep-2025

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax (0727) 322334

①

Kalianda, 12 September 2025

Nomor : 900/ 6498 /V.03/2025
Lampiran : 2 (dua) dokumen
Perihal : Penyampaian Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2026

Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
di -
Kalianda

Dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, yang terdiri dari :

1. Sebanyak 52 (lima puluh dua) dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
2. Sebanyak 52 (lima puluh dua) dokumen Nota Keuangan dan Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Agar kiranya dapat dibahas bersama pada tingkat Badan Anggaran.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Bupati Lampung Selatan
Sekretaris Daerah,



Supriyanto, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690720 199101 1 001

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

RAHASIA

☐

PENTING

☐

RUTIN

☐

Indek : Kode :

Perihal/ Isi Ringkas : Perubahan Pimpinan Fraksi Demokrat

Tgl. No. Surat

: 10 September 2025.

Asal

: DPC Partai Demokrat Lamsei

Tgl. / No. Agenda

: 12 November 2025 / 747

Instruksi / Informasi *)

Diteruskan Kepada :

1.

2.

12 November 2025

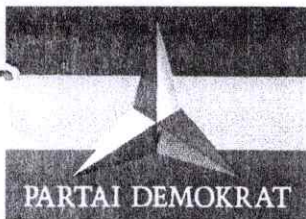
3.

4.

5.

6.

*) Coret yang tidak perlu



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT⁽²⁾ KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Stadion Jati Permai Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan - 35513

E-mail : demokrat_lamsel@gmail.com Blog : partaidemokratlamsel.blogspot.com

Kalianda, 18 September 2025

Nomor : **/35** /DPC.PD/LS/IX/2025
Lampiran : 1 (Satu) Exp.
Perihal : Perubahan Pimpinan Fraksi
Demokrat

Yang Terhormat,
Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Salam Demokrat !

Merujuk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Selatan, serta hasil Rapat Pimpinan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Lampung Selatan tanggal 9 September 2025.

Dengan ini disampaikan perubahan Susunan Pimpinan Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana berikut :

1. Ketua : FITRI PURWANTI, ST., MT
2. Wakil Ketua : JENGGIS KHAN HAIKAL, SH., MH
3. Sekretaris : ACHMAD JOHANI, A.Md.
4. Bendahara : AYU KUMALA SARI, SH
5. Anggota : KODRI

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA

MUHAMMAD JUNAIDI, SH



SEKRETARIS

SUHENDRA

Tembusan :

1. Yth. DPP Partai Demokrat
2. Yth. DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Stadion Jati Permai Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan - 35513
E-mail : demokrat_lamsel@gmail.com Blog : partaidemokratlamsel.blogspot.com

Nomor : 139/DPC.PD/LS/IX/2025



Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung
Selatan

Di
Kalianda



BUPATI LAMPUNG SELATAN

SAMBUTAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN
PADA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA
KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

RABU, 12 NOVEMBER 2025

=====

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat :

- Ketua, para Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

Yang saya hormati :

- Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Bagian, serta para Camat;
- Para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Masyarakat dan Tokoh Pemuda;
- Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan;
- Insan Pers baik media cetak maupun elektronik;
- Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syaloom,
Ohm swastiastu,
Namo budhaya,
Salam keba'ikan.
Tabikpun...

- *Alhamdulillahirrobbil'alamin*, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Aamiin ya robbal alamin.....

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut :
1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 4. Dari sisi tahapan penyusunan, telah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
 5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Rancangan APBD tahun Anggaran 2026 telah menerapkan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

- Pada kesempatan ini kami sampaikan garis besar Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

- 1. Pendapatan Daerah,** diproyeksikan sebesar Rp. 2.102.681.012.612,00 (***Dua Triliun, Seratus Dua Milyar, Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta, Dua***

Belas Ribu, Enam Ratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 428.280.414.612,00 (***Empat Ratus Dua Puluh Delapan Milyar, Dua Ratus Delapan Puluh Juta, Empat Ratus Empat Belas Ribu, Enam Ratus Dua Belas Rupiah***)
 - Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.674.400.598.000,00 (***Satu Triliun, Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar, Empat Ratus Juta, Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah***)
2. **Belanja Daerah**, diproyeksikan sebesar Rp. 2.204.448.012.612,00 (***Dua Triliun, Dua Ratus Empat Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta, Dua Belas Ribu, Enam Ratus Dua Belas Rupiah***) yang terbagi dalam :
- a. Belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 1.528.663.656.735,00 (***Satu Triliun, Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar, Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta,***

***Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu,
Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah),***

- b. Belanja modal direncanakan sebesar Rp. 286.659.914.338,00 (***Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar, Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta, Sembilan Ratus Empat Belas Ribu, Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah***).
- c. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp. 9.675.207.000,00 (***Sembilan Milyar, Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah***).
- d. Belanja transfer direncanakan sebesar Rp. 379.449.234.539,00 (***Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar, Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta, Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah***).
- Beberapa kebijakan terkait penganggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di antaranya :
 - 1. Penyediaan anggaran untuk belanja wajib dan mengikat berupa :

- Belanja gaji dan tunjangan bagi ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD
 - Belanja rutin pembayaran jasa listrik, air, telepon dan internet
 - Belanja pemeliharaan
2. Penyediaan anggaran untuk belanja *mandatory spending* yaitu :
- belanja fungsi Pendidikan.
 - belanja infrastruktur.
 - belanja pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai ASN.
 - belanja penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah.
 - Belanja jaminan kesehatan berupa iuran dan bantuan iuran untuk Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
 - Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

- Alokasi Dana Desa sebesar minimal 10% dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil di luar DBH-Cukai Hasil Tembakau
- 3. Penyediaan anggaran untuk dukungan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 4. Penyediaan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga.
- 5. Penyediaan anggaran untuk penanganan stunting.
- 6. Penyediaan anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem.

Dari rincian tersebut diatas, terdapat defisit belanja terhadap pendapatan sebesar Rp.101.767.000.000,00 (***Seratus Satu Milyar, Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah***).

3. Pembiayaan Daerah;

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari: proyeksi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Proyeksi

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 sebesar Rp.25.000.000.000,00 (***Dua Puluh Lima Milyar Rupiah***) dan proyeksi pinjaman daerah untuk pembayaran infrastruktur sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (***Seratus Milyar Rupiah***), sehingga total penerimaan pembiayaan adalah Rp. 125.000.000.000,00 (***Seratus Dua Puluh Lima Milyar Rupiah***).

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 23.233.000.000,00 (***Dua Puluh Tiga Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah***), terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (***Satu Milyar Rupiah***) pada Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sesuai PerDa Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 tahun 2021 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebesar Rp.22.233.000.000,00 (***Dua Puluh Dua Milyar, Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah***) yang akan digunakan

untuk pembayaran Pinjaman dari Lembaga keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN_Jangka Panjang.

- Dengan demikian maka terdapat surplus pembiayaan sebesar Rp.101.767.000.000,00 (***Seratus Satu Milyar, Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah***) yang akan digunakan untuk menutup defisit belanja sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

- Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada tahun anggaran 2026 kita akan menghadapi tantangan berupa penurunan nilai Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) sebesar 17,69% dibanding nilai TKD pada Perubahan APBD tahun 2025, sesuai surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI nomor S-26/PK/2025.
- Tidak dapat dipungkiri bahwa penurunan nilai TKD tersebut cukup signifikan mempengaruhi besaran anggaran yang kita kelola. Namun demikian, penurunan nilai TKD kiranya menjadi momentum untuk

dapat melaksanakan agenda pembangunan dengan lebih efisien serta lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, dengan tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.

Para hadirin yang kami muliakan,

- Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
- Kami berharap Bapak/Ibu Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat dapat membahas lebih lanjut dan dapat menyetujui Rancangan APBD yang kami sampaikan ini. Besar harapan kami bahwa pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menghasilkan APBD yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.
- Semoga semangat kemitraan dan sinergisitas antara Eksekutif dan Legislatif dapat terus terjaga dengan baik dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan

bimbingan, petunjuk dan hidayah-Nya bagi kita semua dalam menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai ini.

Terima kasih atas perhatiannya.

***Wabillahitaufiq walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Om shanti shanti om,
Namo budhaya.***

BUPATI LAMPUNG SELATAN

RADITYO EGI PRATAMA

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI GERINDRA**



DISAMPAIKAN :

**DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 YANG AKAN DISAMPAIKAN
OLEH BUPATI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kalianda, 12 November 2025



FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 02 kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. (0721) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam Indonesia Raya

Salam Kebajikan

Om Swasti Astu

Name budaya

Shalom

Tabik pun...

- Yth. Sdr. Bupati Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Wakil Bupati Lampung Selatan
Yth. Sdr. Pimpimpinan serta Rekan-Rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Ketua TP. PKK, Dharma wanita Pimpinan Parpol, Ormas, serta rekan-rekan Insan Pers baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati.

Marilah kita Panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya jugalah kita dapat berasama-sama bersilaturahmi dan berkumpul di Ruang Paripurna ini dalam keadaan sehat wal-afiat dengan agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 Yang Akan Disampaikan Oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

Selanjutnya Shollowat dan Salam juga tidak lupa selalu kita panjatkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan Syafa'atnya di Hari Akhir nanti, Aamiin yarobbal alamin.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Gerindra .

**Sdri. Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.
Sdr. Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati.**

Sebelum memulai membacakan pandangan Fraksi izinkan kami mengucapkan pantun

Kucing Lucu Bermain didahan

Melihat tupai dipohon jambu

Bupati Bpk. Egi dan wakil Bupati Bpk Saiful Bersatu padu

Ranperda APBD tahun 2026 untuk lampung selatan lebih maju

Fraksi Partai Gerindra akan mempelajari dengan saksama Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati. Kami memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran eksekutif yang telah menyusun draf ini secara tepat waktu.

Penyusunan APBD adalah momentum krusial untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam angka-angka anggaran yang konkret dan berpihak pada rakyat. APBD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Lampung Selatan.

Setelah melakukan kajian mendalam, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan, pertanyaan, dan catatan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung upaya eksekutif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kami memiliki beberapa catatan:

- a) **Realisme Target:** Kami mempertanyakan seberapa realistis target PAD yang ditetapkan untuk tahun 2026. Kami meminta penjelasan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi (penggalan potensi baru) yang akan dilakukan. Jangan sampai target ini terlalu rendah (menunjukkan kurangnya optimisme) atau terlalu tinggi sehingga tidak tercapai.
- b) **Optimalisasi Sektor Unggulan:** Lampung Selatan memiliki potensi besar di sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian. Fraksi Gerindra meminta penjelasan rinci, sejauh mana APBD 2026 akan mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor ini? Apa langkah konkret untuk menaikkan retribusi dari objek wisata yang dikelola Pemda?
- c) **Cegah Kebocoran:** Kami menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk meminimalisir potensi kebocoran dan meningkatkan transparansi.

2. Fokus dan Alokasi Belanja Daerah

Bagi Fraksi Gerindra, belanja daerah harus berorientasi penuh pada kepentingan rakyat. "Uang rakyat harus kembali ke rakyat".

- a) **Prioritas Sektor Pertanian dan Perikanan (Ketahanan Pangan):**
Ini adalah fokus utama kami. Lampung Selatan adalah lumbung pangan. Kami mempertanyakan secara khusus:
- b) **Seberapa besar alokasi anggaran yang diarahkan untuk subsidi pupuk (di luar program pusat), bantuan bibit unggul, dan perbaikan infrastruktur irigasi tersier?**

- c) Apa program nyata dalam APBD 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan? Bagaimana pengawasan terhadap bantuan alat tangkap agar tepat sasaran?
- d) Fraksi Gerindra meminta APBD 2026 menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tingkat kabupaten.

3. Infrastruktur yang Berkeadilan:

Kami mendukung pembangunan infrastruktur, namun dengan catatan:

- a) Pembangunan tidak boleh "Jawani-sentris" atau "kota-sentris" (terpusat di Kalianda dan sekitarnya). Fraksi Gerindra meminta alokasi yang adil untuk perbaikan dan pemantapan jalan-jalan di pelosok desa dan sentra produksi pertanian.
- b) Infrastruktur harus terhubung. Jalan yang baik harus menghubungkan sentra pertanian/perikanan ke pasar untuk memangkas biaya logistik petani dan nelayan.
- c) Penanganan Stunting dan Kualitas Kesehatan:
Fraksi Gerindra mengapresiasi jika ada penurunan stunting, namun perjuangan belum selesai. Kami meminta keseriusan dalam alokasi anggaran untuk:
 - 1) Intervensi gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita.
 - 2) Peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan Posyandu di seluruh kecamatan.

4. Efisiensi Belanja Birokrasi:

Kami mengingatkan dengan tegas agar eksekutif melakukan efisiensi anggaran.

- a) Pangkas belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas yang tidak substansial, rapat-rapat seremonial, dan pembelian kendaraan dinas baru yang tidak urgen.
- b) Alihkan anggaran tersebut untuk belanja modal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (jalan, sekolah, puskesmas).

5. Optimalisasi Pendapatan Berbasis Digital

- a) Tuntutan Digitalisasi Pendapatan: Kami mempertanyakan, sejauh mana APBD 2026 mengalokasikan anggaran untuk mengintegrasikan seluruh sistem pajak dan retribusi daerah? Kami tidak ingin lagi mendengar ada kebocoran PAD. Fraksi Gerindra menuntut implementasi penuh e-Pajak dan e-Retribusi yang terhubung langsung (real-time) dengan kas daerah, terutama di sektor vital seperti restoran, hotel, dan kantong parkir.
- b) Basis Data (Database) Tunggal: APBD harus menganggarkan terciptanya database wajib pajak dan retribusi yang tunggal dan akurat. Tanpa data valid, target pendapatan hanyalah asumsi.

6. Belanja Daerah yang Efisien dan Tepat Sasaran (Berbasis Teknologi)

Kami meminta eksekutif untuk membuktikan bahwa teknologi dapat memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas belanja.

- 1) Pertanian dan Perikanan (Smart Agro-Marine):
Ini adalah fokus utama kami. Kesejahteraan petani dan nelayan adalah harga mati.
- 2) Fraksi Gerindra mempertanyakan secara khusus: Apakah APBD 2026 menganggarkan program Smart Farming? Bukan hanya bantuan bibit, kami menuntut program

pendampingan teknologi bagi petani, seperti aplikasi informasi cuaca, analisis tanah digital, dan sistem irigasi pintar (smart irrigation).

- 3) Untuk nelayan, kami meminta alokasi untuk teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan (GPS, fish finder) dan teknologi pendingin (cold storage) di sentra-sentra pendaratan ikan untuk menjaga harga.

7. Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Dasar:

- 1) Data Stunting Terpadu: Jangan hanya bicara target penurunan stunting. Kami meminta APBD 2026 menjamin adanya sistem aplikasi terpadu untuk memonitor data stunting secara by name, by address, sehingga intervensi gizi tepat sasaran dan terukur.
- 2) Infrastruktur Digital: Pembangunan jalan beton itu penting, tapi jalan digital (internet) sama pentingnya. Fraksi Gerindra meminta jaminan alokasi untuk mengatasi blank spot di wilayah pedesaan agar anak-anak sekolah dan pelaku UMKM bisa terhubung ke dunia digital.

8. Ekonomi Digital dan UMKM:

APBD 2026 harus menjadi fasilitator bagi UMKM lokal untuk "naik kelas". Kami meminta alokasi yang jelas untuk program digitalisasi UMKM, seperti pelatihan pemasaran digital (digital marketing), fasilitasi masuk ke e-commerce, dan bantuan desain kemasan produk.

- 1) Efisiensi Birokrasi (E-Government):
Fraksi Gerindra mengingatkan dengan tegas agar implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak sekadar formalitas.
- 2) Jika sistem e-office dan video conference sudah berjalan, kami menuntut pemangkasan signifikan pada anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, dan ATK (Alat Tulis Kantor).
- 3) Alihkan efisiensi anggaran tersebut ke belanja modal yang langsung menyentuh rakyat.

9. Transparansi Tata Kelola dan Pengadaan

Teknologi adalah alat terbaik untuk transparansi dan pencegahan korupsi.

- 1) E-Budgeting dan E-Procurement: Fraksi Gerindra meminta jaminan bahwa seluruh proses perencanaan (e-planning) dan lelang (e-procurement) dilakukan 100% secara elektronik dan transparan, yang bisa diakses serta diawasi publik untuk mencegah "proyek titipan" dan mark-up.
- 2) Penggunaan SiLPA: Tingginya SiLPA adalah cermin perencanaan yang buruk. Kami menuntut agar SiLPA tahun 2025 (jika ada) dialokasikan menggunakan sistem yang terencana, bukan untuk program "hantu" di akhir tahun.

Penutup

Fraksi Partai Gerindra memandang APBD 2026 sebagai APBD transisi menuju era digital. kami melihat komitmen nyata eksekutif untuk mengadopsi teknologi guna menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan program yang tajam menyasar kesejahteraan petani, nelayan, dan UMKM.

Fraksi Partai Gerindra telah menelaah Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026. Kami mengapresiasi kerja keras eksekutif. Namun, APBD bukan sekadar dokumen administratif, ia adalah kontrak politik untuk menghadirkan kemakmuran bagi rakyat. "Uang rakyat harus kembali ke rakyat" dalam bentuk program yang paling efektif dan efisien.

Pada penghujung pandangan umum Fraksi Partai Gerindra hari ini, kami kembali mengingatkan agar kita tetap solid dalam semangat kebersamaan untuk memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi kabupaten lampung selatan yang kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan **"Bismillahirrohmanirrohim"** Fraksi Gerindra siap membahas dan mengikuti proses hingga tahapan pengesahan **Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026** yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan.

Semoga berkenan, Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PARTAI GERINDRA kami sampaikan, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Masyarakat Lampung Selatan, Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih serta permohonan maaf apabila terdapat perkataan yang khilaf dan kurang pas yang telah kami sampaikan, kepada Allah kami mohon ampun ini lah persembahkan terbaik sebagai Putra/ Putri Bangsa dan bagi ibu pertiwi Indonesia Raya.

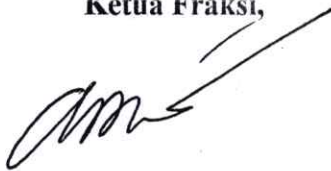
Wabillahit Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kalianda, 12 November 2025

FRAKSI PARTAI GERINDRA
FRAKSI
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ketua Fraksi,

Sekretaris Fraksi,



Amelia Nanda Sari, S.H., M.H. Edo Saputra Wijaya, S.H., M.H.
GERAKAN INDONESIA RAYA
DENAH PERWAKILAN RAKYAT DASAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl Zainal Abidin Pagar Alam No 02 Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322 107



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Terhadap

PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swati Astu Namu Budaya

Tabik Pun.....

Yang Terhormat ;

- Sdr. Bupati Lampung Selatan ;
- Sdr. Wakil Bupati Lampung Selatan ;
- Pimpinan sidang dan rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan ;
- Sdr. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan ;
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten;
- Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Kantor serta para Camat di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sdr. Ketua TP. PKK, Dharma Wanita dan Organisasi Wanita seKabupaten Lampung Selatan;
- Pimpinan Partai Politik dan Ormas se Kabupaten Lampung Selatan;
- Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat;
- Sdr. Rekan-rekan Jurnalis baik Cetak maupun Elektronik serta hadirin undangan yang kami hormati.

MERDEKA ...

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Selatan, untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap :

“penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 oleh Bapak Bupati Lampung Selatan “

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW hingga akhir zaman..amiin

Pimpinan sidang, Saudara Bupati, serta hadirin yang berbahagia;

Saran Fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

- Fraksi mengusulkan agar Ranperda APBD tahun Anggaran 2026 memasukkan alokasi anggaran untuk melanjutkan pembangunan Kalianda Convention Center, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur pendukung dan pengoptimalan potensi pariwisata dan ekonomi lokal. Kami berharap pembangunan ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
- Agar Anggota Pansus Pemekaran Daerah atau Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandar Negara melanjutkan pekerjaan kepanitiaannya untuk segera mewujudkan cita-cita mulia dan janji politik Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dengan memasukkan alokasi anggaran dalam Ranperda APBD tahun Anggaran 2026.

Pimpinan sidang, Saudara Bupati, serta hadirin yang berbahagia;

Selanjutnya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Selatan , Setelah menyimak penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 oleh Bapak Bupati Lampung Selatan tersebut diatas maka Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Menyatakan Dapat Menerima Rancangan Kebijakan tersebut untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Selatan terhadap Penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 oleh Bapak Bupati Lampung Selatan, ada kurang lebihnya dalam penyampaian Pemandangan Umum ini kami mohon maaf, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Merdeka....!!!

Wabillahitaufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kalianda , 12 Nopember 2025

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Periode 2024-2029

Ketua



HENDRY GUNAWAN



Sekretaris



ASMARA, S.Pd

PANDANGAN UMUM
FRAKSI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



DISAMPAIKAN PADA :

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA
(F-GOLKAR)**

**DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026**

Yth. Bupati Lampung Selatan.

Yth. Wakil Bupati Lampung Selatan.

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor di Kabupaten Lampung
Selatan.

Yth. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Pimpinan Parpol, Akademisi, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Pimpinan
Ormas, Insan Pers di Kabupaten Lampung Selatan.

Para hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb

***Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu,
NamoBudaya, Salam Kebajikan. Tabik Puuun...***

Puji Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kab. Lampung Selatan pada Hari Rabu, 12 November 2025 dengan keadaan sehat walafi'at, dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pegikutnya, termasuk kita semua yang ada disini *Aamiin Yarabbal Alamin.*

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disampaikan kepada DPRD. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa APBD merupakan instrument penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Ranperda tersebut harus berlandaskan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 14 Tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam setiap penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD 2026 meliputi lima aspek utama :

1. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
2. Prinsip-prinsip penyusunan APBD, yang menekankan transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,
3. Kebijakan penyusunan APBD, sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan plafon anggaran sementara,
4. Teknis penyusunan APBD, yang berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,
5. Hal-hal khusus lainnya yang diatur dalam lampiran peraturan ini.

Dalam penyusunannya, Pemerintah Daerah juga diwajibkan menyelaraskan KUA dan PPAS dengan pemutakhiran kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional. Selain itu, pemerintah daerah harus memperhatikan penandaan anggaran yang diformulasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Penandaan ini mencakup sejumlah bidang strategis, antara lain :

1. Belanja pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik;
2. Belanja pegawai;
3. Penggunaan hasil pajak daerah untuk kegiatan tertentu;
4. Pengawasan dan standar pelayanan minimal;
5. Keselarasan anggaran dengan Asta Cita;
6. Pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
7. Penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi;
8. Penggunaan Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil termasuk DBH Reboisasi, Cukai Hasil Tembakau, dan Sawit;
9. Isu strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi Partai Golkar juga mendorong agar setiap program dan kegiatan memiliki arah dan tujuan yang jelas, terukur, serta berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

(3)

Yth. Bupati Lampung Selatan.

Rapat Pripurna Dewan Yth.

Para hadirin undangan yang kami hormati.

Untuk itu Fraksi Golkar DPRD Kab. Lampung Selatan, siap membahas Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026.

Demikian Pandangan Umum yang dapat kami sampaikan kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Wabillahitauq Wal Hidayah,

Wassalamu'a'aikum Wr.Wb.

Kalianda, 12 November 2025

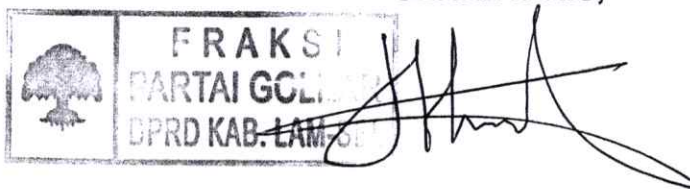
**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,



H. SIDIK MARYANTO, S.Sos

SEKRETARIS,



DERRI KUSUMA, S.E

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DISAMPAIKAN :

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA**

**PENYAMPAIAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026.**

KALIANDA, 12 NOVEMBER 2025



**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.02 Kalianda Lampung Selatan



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan
- Yth, Sdr. Pimpinan Paripurna dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Sdr Pj. Sekretaris DPRD Lampung Selatan
- Yth, Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Badan
- Yth, Sdr. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Sdri. Ketua TP. PKK, Dharma Wanita dan Organisasi Kewanitaan Se-Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Pimpinan Media Massa, serta rekan-rekan insan Pers, baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat Siang Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Tabik Puun....

Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka Rapat Paripurna Penyampaian RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026

Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan Kepada Junjungan Alam Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga Yaumul Kiamat, Aamiin Ya Robbal Aalamin.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Paripurna yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan Pandangan Umum mengenai Penyampaian RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026

----- Paripurna Dewan Yang Terhormat -----

Kepala Daerah selaku pengendali Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pembiayaan-pembiayaan yang harus dibuat dan dirancang sebagai dasar dan acuan dalam mencapai dan mengoptimalkan program maupun kegiatan sebagai bagian umum pelayanan pemerintahan daerah.

----- Paripurna Dewan Yang Terhormat -----

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

----- Paripurna Dewan Yang Terhormat -----

Dengan mengucap Bismillahiromannirohim...

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional MENERIMA dan SIAP MEMBAHAS Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 ini.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah SWT kami mohon ampun.

Wabillahaufik wal hidayah,
Wasallammu'alaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kalianda, 12 November 2025

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA

AGUS SARTONO, S.E



SEKRETARIS

BAYU PRASETYA, S.E

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PKB**



**TERHADAP RANPERDA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**LAMPUNG SELATAN
12 NOVEMBER 2025**

Lampung Selatan, 12 November 2025

**PIMPINAN FRAKSI PKB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,



SUTAJI ABDULLAH



SEKRETARIS,



YUDI SUPRAYOGA



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Alamat Jl.Zainal Abidin Pagar Alam No.02 Kalianda Lampung Selatan

Telp. (0727) 322107



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB DPRD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
RANPERDA
TENTANG
APBD**

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Yth Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan beserta
segenap jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat serta Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr/i. Ketua TP. PKK, Ketua Dharma wanita dan organisasi wanita se-
Kabupaten Lampung Selatan, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat,
Pimpinan Partai Politik, Kaum Akademisi, Para Tenaga Ahli Fraksi,
Pimpinan Media Massa serta Rekan-rekan Insan Pers baik cetak
maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Selamat Siang dan Salam sejahtera untuk kita

semuaTabiiik Puuuun.....

Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah
diberikan kepada kita. Dengan demikian, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar
Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 pada
hari ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pandangan Umum di hadapan Dewan yang terhormat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan untuk kepentingan masyarakat Lampung Selatan, khususnya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat

Setelah mendengarkan nota pengantar Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026, sebagaimana telah disampaikan oleh saudara Bupati, Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam melakukan pengawasan dan penganggaran, Fraksi PKB menyampaikan beberapa **PANDANGAN DAN CATATAN KRITIS** sebagai berikut;;

1. Fraksi PKB menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras menyusun Rancangan APBD Tahun 2026 ini. Dokumen anggaran ini merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

2. Terhadap Struktur dan Kinerja Pendapatan

Fraksi PKB mencatat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar **Rp 428,28 Miliar** hanya menyumbang sekitar **20,36%** dari total pendapatan daerah. Sementara itu, ketergantungan pada Transfer Pusat dan Daerah Lainnya sangat tinggi, yakni **79,64%**.

- **Rekomendasi:** Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih agresif dan inovatif dalam menggali potensi PAD, khususnya dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan UMKM. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pusat. Strategi yang konkret dan terukur untuk peningkatan PAD harus menjadi prioritas.

3. Terhadap Komposisi dan Prioritas Belanja

Secara umum, komposisi belanja sudah mencerminkan arah pembangunan. Namun, Fraksi PKB memberikan perhatian khusus pada beberapa hal:

- **Pendidikan:** Alokasi belanja untuk pendidikan sebesar **Rp 662,29 Miliar** adalah yang tertinggi. Kami mengapresiasi hal ini. Namun, setelah dicermati, porsi belanja modal untuk pendidikan (**Rp 32,36 Miliar**) hanya sekitar **4,8%** dari total belanja pendidikan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional (terutama gaji). Kami mendorong adanya peningkatan kualitas belanja modal di sektor pendidikan untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang masih membutuhkan.
- **Kesehatan:** Alokasi belanja kesehatan sebesar **Rp 386,61 Miliar** patut diapresiasi. Kami melihat adanya distribusi yang cukup merata ke berbagai UPT Puskesmas. Namun, perlu adanya penegasan bahwa anggaran ini harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan pencegahan stunting, yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama.
- **Pertanian dan Perikanan:** Sebagai daerah agraris dan maritim, alokasi untuk urusan pertanian (**Rp 26,92 Miliar**) dan kelautan & perikanan (**Rp 6,19 Miliar**) dinilai **masih sangat rendah**. Padahal, sektor inilah yang menyerap tenaga kerja terbanyak. Fraksi PKB mendesak adanya penambahan alokasi yang signifikan untuk kedua sektor strategis ini, khususnya untuk program pemberdayaan petani dan nelayan, serta penguatan infrastruktur pendukungnya.
- **Infrastruktur Dasar:** Alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi sebesar **Rp 193,42 Miliar** adalah yang terbesar dalam belanja modal. Kami mendukung hal ini dengan catatan bahwa prioritas harus diberikan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur di pedesaan dan wilayah terpencil yang masih tertinggal, untuk mendukung pemerataan pembangunan.

4. Terhadap Defisit dan Pembiayaan

APBD 2026 mencatat defisit sebesar **Rp 101,76 Miliar**. Defisit ini ditutup dengan pembiayaan, termasuk **penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp 100 Miliar**.

Catatan Kritis: Fraksi PKB menyatakan kehati-hatian terhadap kebijakan utang ini. Kami meminta jaminan transparansi dan kejelasan dari Pemerintah Daerah mengenai **tujuan, skema, dan kemampuan bayar (repayment capacity)** dari utang tersebut. Utang harus dialokasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan menghasilkan pendapatan di masa depan (revenue generating project), bukan untuk membiayai belanja rutin.

5. Terhadap Penganggaran yang Berpihak pada Rakyat Kecil

Fraksi PKB mendorong agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial.

- **Rekomendasi:** Kami meminta penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, dan dukungan yang nyata bagi koperasi serta UMKM. Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UKM, serta program bantuan sosial harus dievaluasi kembali efektivitasnya dan dioptimalkan untuk memastikan manfaatnya langsung menyentuh masyarakat lapisan terbawah.

Hadirin sidang Paripurna yang Terhormat

Dengan memperhatikan Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun 2026 maka dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirrohim** Fraksi PKB siap membahas Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 pada tahapan selanjutnya.

Demikian Penyampaian Pandangan Umum Fraksi PKB DPRD Kabupaten Lampung Selatan, akhirnya apabila ada kata-kata dalam penyusunan kalimat yang kurang berkenan dihati para hadirin sekalian, atas nama Fraksi kami mohon maaf.

Wallahulmuafiq ila Aqwamithoriq.

Wassalamualaikum wr.wb.

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TERHADAP

**RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



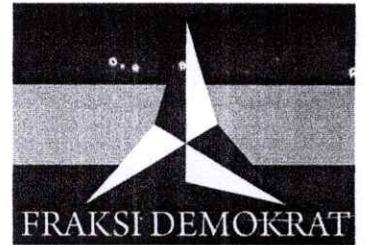
**DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TANGGAL 12 NOVEMBER 2025



**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 02 Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322107



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Pimpinan Sidang serta Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.
Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta, Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Kepala Dinas / Instansi, Badan dan Bagian serta Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Ketua TP. PKK, Dharma wanita dan organisasi wanita Se-Kabupaten Lampung Selatan.
Media Massa serta Rekan-rekan Insan Pers baik cetak maupun elektronik.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat Siang dan salam sejahtera bagi kita semua

Tabik Puun.....

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyampaian RAPBD tepat waktu sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Kami memandang bahwa RAPBD harus menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu kami menyampaikan beberapa catatan penting:

1. Pendapatan transfer PPAS sebesar Rp. 2.007.646.952.000 (Dua triliun tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
RAPBD 2026 Rp. 1.674.400.598.000 (Satu triliun enam ratus tujuh puluh empat milyar, empat ratus juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
Dari data tersebut, anggaran berkurang sebesar Rp. 333.246.354.000 (tiga ratus tiga puluh tiga milyar, dua ratus empat puluh enam juta, lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)
Dengan adanya pengurangan Anggaran RAPBD TA 2026 ini, tentunya pihak eksekutif harus merancang anggaran belanja yang menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal belanja modal
Fraksi Demokrat menyarankan kepada Pemerintah Kab. Lampung Selatan dalam hal mengalokasikan anggaran belanja Infrastruktur pelayanan publik atau belanja modal dalam penyusunan APBD agar diproyeksikan meningkat secara bertahap, guna memenuhi Presentase paling rendah 40% dari total APBD, sebagaimana yang diamanatkan UU No.1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pendapatan daerah hendaknya disusun secara realistis dan berbasis potensi riil, dengan upaya peningkatan PAD tanpa menambah beban masyarakat.
3. Belanja daerah agar difokuskan pada kebutuhan dasar rakyat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM.
4. Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, termasuk penurunan angka pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM.
5. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus dijaga, sehingga setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
6. Perhatian terhadap lingkungan dan penanggulangan bencana agar menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan.

Dengan memperhatikan masukan dan penyempurnaan lebih lanjut, dengan mengucapkan **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** Fraksi Partai Demokrat dapat menerima **RAPBD Tahun Anggaran 2026 dan SIAP** untuk membahas pada tahap selanjutnya.

Demikian pandangan umum Fraksi Partai Demokrat kami sampaikan.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

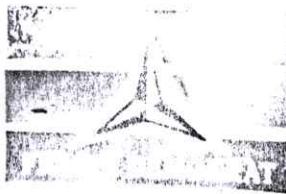
Kalianda, 12 November 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Ketua,



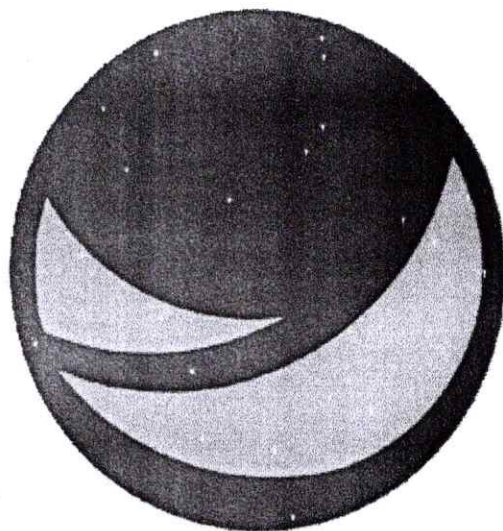
FITRI PURWANTI S.T.,M.T



Sekretaris,



ACHMAD JOHANI A.Md



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NasDem DPRD LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
NOTA PENGANTAR RANPERDA
APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**LAMPUNG SELATAN
12 NOVEMBER 2025**



**FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Alamat Jl.Zainal Abidin Pagar Alam No.02 Kalianda Lampung Selatan
Telp.(0727) 322 107



**PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
NOTA PENGANTAR RANPERDA
APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Yth Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan berserta segenap jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Pimpinan Rapat serta Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Sekda / Asisten / Staf Ahli Bupati.
- Yth. Sdr/i. Kepala Dinas / Instansi dan Camat di Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr/i. Ketua Ormas, Ketua TP. PKK, Ketua Dharma wanita dan organisasi wanita se-Kabupaten Lampung Selatan, serta Rekan-rekan Insan Pers baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Salam sejahtera untuk kita semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Tabiiik Puuuun.....

Salam RESTORASI !!!

Marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur atas anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kesehatan dan kesempatan-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 Oleh Bupati Lampung Selatan.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi NasDem untuk menyampaikan Pandangan Umum di hadapan Sidang Paripurna yang terhormat. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat Lampung Selatan secara umum.

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Rapat serta para hadirin yang kami hormati

Menindaklanjuti Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, izinkan kami menyampaikan pandangan umum fraksi dalam bentuk catatan serta saran sebagai kontribusi untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

1. Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja Bupati Lampung Selatan beserta Aparatur Pemerintah Daerah Lampung Selatan yang telah melaksanakan tugasnya dalam menyusun Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 bersama perangkat daerah atau OPD yang telah sesuai dengan ketentuan serta Peraturan yang berlaku.
2. Fraksi NasDem menyarankan mengenai alokasi dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, khususnya Bidang Pendidikan sebagai pilar penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Fraksi NasDem memberikan catatan pada beberapa alokasi belanja Dinas Pendidikan, yaitu:
 - a. Optimalisasi Belanja Program Pendidikan: Anggaran harus dioptimalkan untuk program-program yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Fraksi NasDem meminta agar pagu indikatif belanja untuk program-program di bawah urusan pendidikan tidak hanya bersifat rutinitas operasional, melainkan juga memprioritaskan program terobosan untuk pemerataan mutu pendidikan.
 - b. Penguatan Sekolah di Pelosok: Pemerintah wajib memastikan bahwa alokasi belanja, baik Operasi maupun Modal, mencapai sekolah-sekolah di wilayah terdepan dan terpencil di seluruh Kecamatan/Desa, agar terjadi pemerataan akses dan kualitas fasilitas pendidikan.
 - c. Inovasi dan Pengawasan: Fraksi NasDem mendesak Dinas Pendidikan untuk memasukkan indikator kinerja yang lebih terukur dalam setiap Sub Kegiatan, guna memudahkan pengawasan dan evaluasi oleh DPRD, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan berdampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung

Selatan
Fraksi NasDem menghormati. Atas nama Dinas yang tidak menghadiri RDP dan telah
seluruhnya diminta kepada Bupati sebagai Managemen atau Managemen
Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Rapat serta para hadirin yang kami hormati. *disiplin*

Demikianlah pandangan umum Fraksi ini kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Fraksi. Selanjutnya (dengan mengucap **Bismillahhirohmannirohim**), Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyatakan **Bersedia Untuk Membahas Ditingkat Selanjutnya** Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026. Atas perhatian dan kerja sama semua pinak, kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya yang kita lakukan senantiasa membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai bersama.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Shalom

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Namo budhaya

Salam Kebajikan

Lampung Selatan, 12 November 2025

**PIMPINAN FRAKSI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,



**FRAKSI NASDEM
DPRD LAMPUNG SELATAN**

M.GILANG SATRIA RIANDY,SE.,MM.

SEKRETARIS,

POLMAN SINAGA



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PKS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Assalamualaikum wr.wb

Tabik pun...

Yang Kami Hormati Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan.

Yang Kami Hormati Saudara Bupati Lampung Selatan, Wakil bupati, beserta seluruh jajaran Eksekutif kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Unsur-Unsur Forkopimda kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Pimpinan Partai, Ormas, Akademisi, LSM, kabupaten Lampung Selatan, Rekan-Rekan Pimpinan Media Massa, Cetak dan Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kita par.jatkan kehadirat Allah SWT.
Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan



kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan sidang yang berkenan memberikan waktu kepada kami guna menyampaikan pandangan akhir fraksi pada kesempatan ini.

Hadirin peserta Sidang yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum Fraksi ini, kami Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati Lampung Selatan yang telah menyampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026 dengan baik.

Maka setelah menyimak dan mencermati Nota Pengantar Ranperda APBD tahun anggaran 2026, izinkan kami Fraksi PKS menyampaikan Pandangan Umum fraksi sebagai berikut :

Pertama ,

Fraksi PKS mencermati Penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) 2026 secara nasional termasuk ke Lampung Selatan terkena penurunan 16.6% dari PPAS tahun



anggaran 2026 yakni sebesar Rp. 333.246.354.000 (Tiga ratus tiga puluh tiga MILYAR dua ratus empat puluh enam Juta, Tiga ratus lima puluh empat rupiah), tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi kondisi fiskal dan potensi perombakan perencanaan pembangunan tahun 2026 yang sudah kita rancang dan sahkan di KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2026.

Terkait hal ini, Fraksi PKS menekankan kepada eksekutif agar penataan perencanaan pembangunan tahun 2026 harus **MEMPERHATIKAN** arahan dan alasan dasar Kementerian Keuangan menurunkan TKD yakni : 1) adanya penyerapan anggaran yang tidak optimal, 2) terjadinya penyelewengan anggaran, 3) keterbatasan fiskal, 4) mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran, dan 5). upaya peningkatan kinerja daerah.

Catatan Kedua :

Fraksi PKS mencermati Rencana Perda APBD 2026 yang disajikan eksekutif masih belum maksimal memenuhi arahan Kementerian Keuangan terkait arahan Menteri Keuangan diatas ; misal terkait isu keterbatasan fiskal dan semangat



FRAKSI PKS DPRD LAMPUNG SELATAN

efektifitas dan efisiensi anggaran, kami melihat struktur Belanja Pegawai sebesar 37.78% dari total Belanja APBD belum mengikuti mandatory spending sebagai amanah UU No.1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Belanja Pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Masih tingginya alokasi anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP dengan total sebesar 90.85 Milyar lebih, juga menjadi beban Belanja Pegawai dan berpotensi menurunkan KKD (Kemampuan Keuangan Daerah) Kabupaten Lampung Selatan. Dalam hal ini Fraksi PKS menyampaikan Opsi Rasionalisasi TPP agar bisa memenuhi amanah UU no.1 tahun 2022 dan melaksanakan arahan Kementerian Keuangan serta bentuk kepedulian masyarakat ; sebagaimana juga dilaksanakan banyak propinsi dan kabupaten se Indonesia, contoh Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Jember, Cilacap, Kudus, kabupaten Lampung Barat dan daerah lainnya.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat :

KETIGA : Fraksi PKS juga mencermati struktur anggaran belanja APBD 2026 berdasar kelompok masih didominasi Belanja Operasi sebesar 68.66% dari total APBD yakni sebesar



1.513.663.656.735 (Satu trilyun, Lima ratus tiga belas MILYAR, Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta, Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu, Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima rupiah) yang didalamnya terdapat Belanja Barang & Jasa yang masih besar dan memungkinkan dilakukan efisiensi.

Di satu sisi, Anggaran Belanja Modal sejumlah Rp. 305.659.914.338 (Tiga ratus lima MILYAR, Enam ratus lima puluh sembilan JUTA, Sembilan ratus empat belas ribu, Tiga ratus tigapuluh delapan rupiah) atau hanya 13.87% dari Total Belanja APBD 2026 ; yang didalamnya Program Penyelenggaraan Jalan & Jembatan PUPR hanya 175-an Milyar tentunya sangat tidak ideal untuk menyelesaikan permasalahan Infrastruktur khususnya jalan rusak di Lampung Selatan.

Berkaitan hal diatas, Fraksi PKS terus menekankan semangat efisiensi dan rasionalisasi Belanja Barang & Jasa dialihkan ke Belanja Modal seperti yang kita lakukan di Era Covid dan Era Efisiensi tahun 2025 ini, demi menyesuaikan arahan Kementerian Keuangan dan Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Lampung Selatan khususnya PR Infrastruktur Jalan Mantap.



Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Terakhir,

Fraksi PKS menekankan Kepada Eksekutif, khususnya TAPD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar Pro-aktif melaksanakan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah Provinsi dan Pusat, terutama dalam hal mengakses Program dan Kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Organisasi Perangkat Daerah juga harus terus optimal melakukan kreativitas dan inovasi serta terobosan dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah agar ketergantungan fiskal terhadap pusat bisa lebih berkurang

Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,
Demikianlah PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS ini kami sampaikan, catatan lain terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD 2026 akan kami sampaikan di Pembahasan Tingkat Banggar.

dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PKS SIAP MEMBAHAS RANPERDA APBD Tahun Anggaran 2026 di Tingkat Selanjutnya.



Akhirulkalam, mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa memberkahi kerja-kerja kita membangun Lampung Selatan, serta senantiasa mencurahkan taufiq dan hidayahnya kepada kita agar kita mampu mewujudkan Lampung Selatan kedepan, menjadi Lampung Selatan yang ADIL SEJAHTERA baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin.

Ikan Hiu Makan Kayu
Kayu Tritip dibalik Batu
Egi Syaiful I Love You
Ayo Legislatif Eksekutif Bersatu !

BISMILLAH BISA !

Wassalamualaikum wr.wb

Kalianda, 11 November 2025
Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lampung Selatan


DEDE SUHENDAR, M.Pd
Sekretaris


BOWO EDY ANGGORO, S.E
Ketua



BUPATI LAMPUNG SELATAN

TANGGAPAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN
ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
TERHADAP NOTA PENGANTAR RANPERDA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

RABU, 12 NOVEMBER 2025

=====

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat :

- Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- Wakil Bupati;
- Anggota Forkopimda;

Yang saya hormati :

- Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah;

- Para Camat, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda;
- Rekan-rekan media, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syaloom,
Ohm swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan.
Tabikpun...

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk terus berkomitmen melanjutkan pembangunan **Kabupaten Lampung Selatan tercinta.**

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas pandangan, kritik, serta saran yang disampaikan dengan semangat kemitraan konstruktif.

Inilah wujud nyata dari ***Demokrasi deliberatif***, dimana pemerintah daerah dan DPRD saling menguatkan dalam semangat

check and balance demi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Sidang Paripurna hari ini bukan sekedar forum formalitas. Ini adalah **momentum strategis**, momentum untuk menegaskan arah pembangunan Lampung Selatan Tahun 2026,

sebuah tahun penting yang akan menentukan keberlanjutan transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan kita.

Kita sadar bahwa APBD bukan hanya dokumen keuangan. APBD merupakan **instrumen politik kebijakan publik**, cerminan nilai, prioritas, dan keberpihakan kita terhadap masyarakat. Oleh karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus mengandung nilai keadilan, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, serta **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020**

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan APBD Tahun 2026 berlandaskan pada **RKPD Tahun 2026**, dengan memperhatikan arah kebijakan **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026**, serta sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Artinya, setiap program dan kegiatan yang dianggarkan memiliki **dasar hukum, arah strategis, dan capaian yang terukur**.

Dari setiap pandangan umum, pendapat dan kritik yang disampaikan setiap Fraksi, tentunya akan menjadi salah satu acuan kami dalam menyusun APBD Tahun 2026. Dan kedepan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan terus memperkuat langkah-langkah strategis seperti: **Digitalisasi pendapatan daerah, Reformasi belanja daerah, Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan Peningkatan kapasitas SDM**, baik aparatur maupun masyarakat, sebagai fondasi daya saing daerah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita hidup di masa perubahan yang cepat. Tahun 2026 akan menjadi momentum penting, Bangsa Indonesia memasuki era pasca Pemilu nasional, dengan arah kebijakan ekonomi baru, transformasi digital, serta penguatan ketahanan pangan dan energi nasional.

Oleh karena itu, **Lampung Selatan harus adaptif terhadap arus besar perubahan global**, krisis iklim, digitalisasi ekonomi, dan pergeseran struktur tenaga kerja.

Dan pada kesempatan ini Saya ingin mengajak kita semua untuk mengawal dan mendukung **Rancangan APBD Tahun 2026** ini. Dengan niat tulus, kerja keras, dan semangat kolaborasi. Kita satukan tekad dengan semangat "**Lampung Selatan Maju, 'Bismillah Bisa'**", bersama kita wujudkan **Lampung Selatan Maju menuju Indonesia Emas 2045**.

Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerja sama seluruh pihak, DPRD,

Forkopimda, Perangkat Daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah pengabdian kita untuk Lampung Selatan yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.

Wallohu muwafik illa qoumithoriq,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti om,

Namo budhaya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

RADITYO EGI PRATAMA, ST.,MBA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 12 - NOV - 2025
Acara : Rapat Paripurna

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ERMA YUSNELI, SE., MM	KETUA DPRD KAB. LAMSEL	1.....
2	MERIK HAVIT, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD KAB. LAMSEL	2.....
3	BENNY RAHARJO., SH	WAKIL KETUA DPRD KAB. LAMSEL	3.....
4	BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A	WAKIL KETUA DPRD KAB. LAMSEL	4.....
5	AMELIA NANDA SARI, SH., MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	5.....
6	NUR ARIFIN, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	6.....
7	YUTI RAMAYANTI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	7.....
8	ALI WARNADA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	8.....
9	WARIS BASUKI, SH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	9.....
10	EDO SAPUTRA WIJAYA, SH., MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	10.....
11	DWI RIYANTO, SE., MM	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	11.....
12	FARIZAL PURBA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	12.....
13	ROSDIANA, SH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	13.....
14	SUHAR PUJIANTO	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	14.....
15	TAMAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	15.....
16	HENDRY GUNAWAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	16.....
17	ASMARA, S.Pd	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	17.....
18	SUPRIYATI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	18.....
19	SAMSUL H. SUHARTONO, S.Pd	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	19.....
20	MADE SUKINTRE, S.Pd., M.Pd.H	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	20.....
21	AHMAD MUSLIM AM, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	21.....
22	Hi. SIDIK MARYANTO, S.Sos	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	22.....
23	SYAIFUL AZUMAR, SH.,MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	23.....
24	PRAMADJI NADYAN INGGARJITO	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	24.....

1	2	3	4
25	DERI KUSUMA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	25.....
26	AGUS SARTONO, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	26.....
27	WIDODO	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	27.....
28	BAYU PRASETYA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	28.....
29	HJ. RUSDIANTI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	29.....
30	EDI WALUYO, ST	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	30.....
31	SUTAJI ABDULLAH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	31.....
32	HAMDANI, S.H.I	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	32.....
33	HERLIZA, A.Md	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	33.....
34	MISMAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	34.....
35	ISMAIL, SE., MM	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	35.....
36	SUHADIRIN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	36.....
37	JENGGIS KHAN HAIKAL, SH., MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	37.....
38	ACHMAD JOHANI, A.Md	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	38.....
39	KODRI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	39.....
40	AYU KUMALA SARI, SH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	40.....
41	FITRI PURWANTI, ST., MT	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	41.....
42	POLMAN SINAGA	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	42.....
43	SLAMET NURIMAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	43.....
44	M. GILANG SATRIA RIANDY, SE., MM	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	44.....
45	YULIDA NANDAR LAILA	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	45.....
46	YUDI PRAYOGA	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	46.....
47	BOWO EDY ANGGORO, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	47.....
48	DEDE SUHENDAR, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	48.....
49	KASMANI, ST., M.Si	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	49.....
50	IMAM ROHADI, S.Hut	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	50.....

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,

(.....)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kallanda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR : UNDANGAN RAPAT PARIPURNA.....
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
UNTUK SEKRETARIAT KAB. LAMPUNG SELATAN

HARI :

TANGGAL :

TENTANG :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	TATANG SLAMET	DANDIM 0421 LAMPUNG SELATAN	1.
2.	Akp. TONI KASMIYAH SH. MIP	KAPOLRES LAMPUNG SELATAN	2.
3.	GILANG ROKA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA LAMPUNG SELATAN	3.
4.		KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA LAMPUNG SELATAN	4.
5.	Fauzi	KETUA PENGADILAN AGAMA KALIANDA LAMPUNG SELATAN	5.
6.		KA. LAPAS KELAS II KALIANDA LAMPUNG SELATAN	6.
7.		KA. IMIGRASI KELAS III KALIANDA LAMPUNG SELATAN	7.



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635. Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR :UNDANGAN RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
HARI: RABU
TANGGAL: 12 - NOV - 2025
TENTANG:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Supriyem	SEKRETARIS KABUPATEN	1.
2.		ASSISTEN BID. PEMERINTAHAN	2.
3.		ASSISTEN BID. EKONOMI & PEMBANGUNAN	3.
4.	Edy F.	ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM	4.
5.	Awan C	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	5.
6.	Yanny M	STAF AHLI BID. EKONOMI, PEMBANGUNAN & KEMASYARAKATAN	6.
7.		STAF AHLI BID. KEUANGAN	7.
8.	Setiawan Syah	KABAG TATA PEMERINTAHAN	8.
9.	M. Ali	KABAG KERJASAMA	9.
10.		KABAG ORGANISASI	10.
11.		KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	11.
12.		KABAG SUMBER DAYA ALAM	12.
13.		KABAG UMUM	13.
14.	Firman	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.
15.		KABAG PENGADAAN BARANG & JASA	15.
16.	Rosa Rosnita	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	16.
17.	MARLENA	KABAG PEREKONOMIAN	17.
18.	Abdulman	KABAG HUKUM	18.
19.		KABAG PERENCANAAN KEUANGAN	19.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)

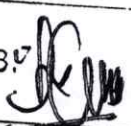
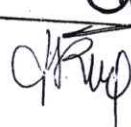
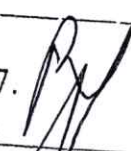
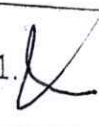
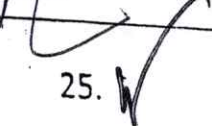
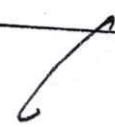
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT PARIPURNA.....
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HARI : Rabu
TANGGAL : 12 NOV - 2025
ACARA :
TEMPAT :
.....

NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		DINAS KESEHATAN	1.
2.	Kersti Indrawati	RSUD BOB BAZAR	2.
3.	Puji	DINAS SOSIAL	3.
4.	Ahman Haru O	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4.
5.	Badruzzaman	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.
6.		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.
7.		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7.
8.	Eka Rianhwa	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.
9.	Ratna Jumi	DINAS PERIKANAN	9.
10.	ABIDIN	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.
11.	AnasRullah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.

12.		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12.
13.	Iskandar - SE	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13. 
14.	Rini ariah	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14. 
15.	Dicker Yuriam	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. 
16.	Nessi Yunta	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16. 
17.	Rika wah	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	17. 
18.	Dwi Yobu	DINAS PERHUBUNGAN	18. 
19.	M. Darmawan	DINAS PENDIDIKAN	19. 
20.	Mugijones	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAL & PERKEBUNAN	20. 
21.	Edy - F	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	21. 
22.		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	22. 
23.	Rio Casmara	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	23. 
24.	M. Darmawan	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	24. 
25.		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	25. 
26.	LEO	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT LAMPUNG SELATAN	26. 
27.		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27. 
28.	M. Hukidi	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28. 
29.		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29. 

30.	NOBEL	BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	30.
31.	/	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	31.
32.	Arya	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	32.
33.	Ando. C.	INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	33.
34.	Manur	SATUAN POL PP	34.
35.		SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI	35.
36.		KETUA KPU LAMPUNG SELATAN	36.
37.		SEKRETARIS KPU LAMPUNG SELATAN	37.
38.		KEMENTERIAN AGAMA	38.
39.		BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39.
40.		DARMAWANITA PERSATUAN LAMPUNG SELATAN	40.
41.		PKK LAMPUNG SELATAN	41.
42.		PLN RANTING KALIANDA LAMPUNG SELATAN	42.
43.		PDAM TIRTAYASA LAMPUNG SELATAN	43.
44.		KWARCAP LAMPUNG SELATAN	44.
45.		BPS LAMPUNG SELATAN	45.
46.		BUMD	46.
47.		BAWASLU	47.
48.		BPN	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322605, Fax (0727) 322107

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Hari : Rabu
Tanggal : 12 - NOV - 2025
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Ruris. Apdani	KALIANDA	1
2	firdaus	RAJABASA	2
3	Syaifulloh	PENENGALIAN	3
4	Rosalina	PALAS	4
5	SIDIK - SH. MM.	BAKAUHENI	5
6	Eni Mahendr ko	KETAPANG	6
7	Wayan Susanto	SRAGI	7
8	R. Ramut mangga	WAY PANJI	8
9	Fran. S	SIDOMULYO	9
10	Sumiyati. SE	CANDIPURO	10
11	Fitri Indayat.	WAY SULAN	11
12	Ardi	KETIBUNG	12
13	Resny	MERBAU MATARAM	13
14	HERI. P.	TANJUNG BINTANG	14
15	HANDOYO	TANJUNG SARI	15
16	Rizwan Ef Fendi	JATI AGUNG	16
17	Eko Rwan	NATAR	17

SUSUNAN ACARA

1. PEMBUKAAN
2. PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026 OLEH BUPATI LAMPUNG SELATAN
3. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
4. JAWABAN/ TANGGAPAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
5. SKORS

Catatan : Pakaian

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Bupati dan Wakil Bupati | : PSR + Peci |
| 2. Anggota Dewan | : PSR + Peci |
| 3. Undangan | |
| - Forkopimda | : PDH |
| - Sekda/ Assisten/ Staf Ahli Bupati | : PSR + Peci |
| - Dinas Instansi/ Camat | : PSR + Peci |
| - Ormas/ Akademisi/ TP. PKK/ DHARMA WANITA | : Seragam Org Masing-masing |



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 11 November 2025

Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 Oktober 2025 diantaranya menetapkan jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu, Saudara/Saudari pada acara dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 12 November 2025
Pukul : 13.00 WIB s/d 15.00 Wib
Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRD Kab. Lampung Selatan.
Jalan Z.A. Pagaralam No. 02 Kalianda.

Demikian atas kehadiran Bapak/Ibu Saudara/Saudari, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA,

ERMA YUSNELI, S.E., M.M.



RISALAH

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026.**

**PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TANGGAL 26 NOVEMBER 2025**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

RISALAH : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

I. Waktu dan Tempat :

Hari : Rabu.
Tanggal : 26 November 2025.
Waktu : 13.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Acara : Dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Kab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

II. Jenis Rapat : Rapat Paripurna

III. Sifat Rapat : Terbuka Untuk Umum

IV. Acara Rapat : 1. Skors Rapat dicabut
2. Pembacaan Laporan Badan Anggran Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
3. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Lampung Selatan.
4. Kesimpulan Rapat dan Penandatanganan Persetujuan Bersama.
5. Sambutan Bupati Lampung Selatan
6. Penutup

V. Peserta Rapat :

1. Duduk di Kursi Pimpinan :
 - Pimpinan Rapat Wakil Ketua DPRD LS : MERIK HAVIT, S.H., M.H.
 - Wakil Ketua DPRD Kab. Lam-Sel : - A. BENNY RAHARJO, S.H.
- BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A.
 - Bupati Lampung Selatan : RADITYO EGI PRATAMA, S.T., M.B.A.
 - Wakil Bupati Lampung Selatan : M. SYAIFUL ANWAR, S.T., M.Pd.

Duduk disamping/belakang Pimpinan :

- Plt. Sekretaris DPRD : ACHMAD HERRY, S.E., M.M.
- Kabag Fasilitasi & PP : SUSILO HADI, S.Sos
- Kabag Program dan Keuangan : LULUK TANTRI ELVANDARI, S.H., M.M.
- Kabag Umum : Hj. RATNAWATI, S.E., M.M.

2. Anggota Dewan yang hadir :

- Fraksi Gerindra : 8 Orang
- Fraksi PDI Perjuangan : 7 Orang
- Fraksi Golkar : 5 Orang
- Fraksi PAN : 5 Orang
- Fraksi PKB : 4 Orang
- Fraksi Demokrat : 4 Orang
- Fraksi NasDem : 5 Orang
- Fraksi PKS : 2 Orang
- JUMLAH : 40 Orang

3. Anggota Dewan yang tidak hadir :

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Fraksi Gerindra | : ERMA YUSNELI, S.E., M.M. (Izin) |
| - Fraksi PDI Perjuangan | : TAMAN (Izin/ Umroh) |
| - Fraksi Golkar | : - AHMAD MUSLIM, AM. S.E. (Izin) |
| | - SYAIFUL AZUMAR, S.H., M.H (Izin) |
| - Fraksi PAN | : Hj. RUSDIANTI (Izin) |
| - Fraksi PKB | : - HAMDANI, S.Hi (Izin) |
| | - HERLIZA, A.Md (Izin) |
| - Fraksi Demokrat | : AYU KUMALA SARI, S.H. (sakit) |
| - Fraksi PKS | : - KASMANI, S.T., M.Si (Izin) |
| | - IMAM ROHADI, S.Hut (sakit) |

4. Undangan yang hadir :

- Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan
- Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setdakab, Inspektur dan Para Kabag Setdakab Lampung Selatan.
- Para Kepala Dinas/ Kepala Badan dan para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Ormas, Insan Pers baik Cetak maupun Elektronik.

VI. JALANYA RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA, SYALOM, OHM SWASTIASTU, NAMO BUDAYA, SALAM KEBAJIKAN, TABIK PUUN.....

SEBELUM RAPAT PARIPURNA HARI INI DIBUKA SECARA RESMI, GUNA MENANAMKAN RASA KEBANGSAAN MARILAH KITA IKUTI BERSAMA LAGU INDONESIA RAYA DAN DILANJUTKAN MARS LAMPUNG SELATAN, KEPADA PARA HADIRIN DIMOHON UNTUK BERDIRI, DIPERSILAHKAN.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MARS LAMPUNG SELATAN).

2. PIMPINAN RAPAT.

TERIMA KASIH, HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

UNTUK SELANJUTNYA SESUAI DENGAN TATA TERTIB DPRD KAB. LAM-SEL, KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH. DAN MEMBACAKAN SURAT MASUK YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA PADA HARI INI, DIPERSILAHKAN

PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH, DAN SURAT-SURAT MASUK)

3. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH. DAN SURAT-SURAT MASUK SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, MENINGAT SAAT INI TELAH HADIR **40** ORANG ANGGOTA DEWAN YTH, DENGAN DEMIKIAN QOURUM RAPAT PARIPURNA TELAH TERPENUHI, MAKA DENGAN MENGUCAP, "**BISMILLAHIR ROHMANIRROHIM**" RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, MASA PERSIDANGAN KE-TIGA RAPAT KE-25 TAHUN SIDANG 2025, DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. **UNTUK ITU SKORS RAPAT DICABUT, MAKA RAPAT SECARA RESMI DIBUKA DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM.**

-----KETUKAN PALU 3 KALI-----

YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN.

YTH. SDR. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YTH.

YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, SEKDAKAB SERTA PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, INSPEKTUR, PARA KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BAGIAN DAN CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

SDR. ALIANSI LAMPUNG SELATAN BERSATU, INSAN PERS, HADIRIN PARA UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN.

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN DAN KEKUATAN UNTUK MENJALANKAN SEGALA AKTIFITAS PADA HARI INI, SEBAGAI TINDAK LANJUT PARIPURNA DEWAN PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2025, DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DAN DITINDAKLANJUTI PEMBAHASAN OLEH BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) SERTA OPD DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

UNTUK ITU DIHARAPKAN PADA RAPAT HARI INI BADAN ANGGARAN DPRD DAPAT MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN APBD TERSEBUT, SELANJUTNYA BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2025, ANTARA LAIN MENETAPKAN RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. SKORS RAPAT (DICABUT).
2. LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD.
3. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD.
4. KESIMPULAN / PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA.
5. SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
6. PENUTUP.

DEMI MUSYAWARAH MUFAKAT APAKAH SUSUNAN ACARA TERSEBUT DAPAT DISETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

YTH. SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN
PARA HADIRIN, UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN.

ACARA YANG KE-DUA YAITU LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD ATAS HASIL PEMBAHASAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, KEPADA PERSONIL BADAN ANGGARAN DPRD, DIPERSILAHKAN.

BADAN ANGGARAN
(MENYAMPAIKAN LAPORANNYA)

4. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. **JENGGIS KHAN HAIKAL, S.H., MH.** PERSONIL BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

SEBELUM ACARA YANG KE-TIGA YAITU PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT MASUK DARI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL 31 OKTOBER 2025, YANG MENYAMPAIKAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 DAN SURAT MASUK DARI KOMISI IV DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2025, PERIHAL PENYAMPAIAN USUL RANPERDA INISIATIF DEWAN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN UNTUK DITETAPKAN DALAM PROPEMPERDA 2026, DAN HAL INI TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH BAPEMPERDA DPRD MELALUI RAPAT BAPEMPERDA DENGAN OPD YANG MENANGANI BIDANG HUKUM TANGGAL 26 NOVEMBER 2025, MAKA PROPEMPERDA 2026 PERLU DISEPAKATI UNTUK DIUMUMKAN DAN DITETAPKAN DALAM RAPAT PARIPURNA.

MENGINGAT SESUAI PASAL 239 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN SESUAI PASAL 15 AYAT (4) PERMENDAGRI 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, DIJELASKAN BAHWA "PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN SETIAP TAHUN SEBELUM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD", **MAKA PENETAPAN PROPEMPERDA TAHUN 2026 AKAN DISEPAKATI SEBELUM APBD DITETAPKAN**, UNTUK ITU APAKAH PARIPURNA DAPAT MENYETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PERSETUJUAN PROPEMPERDA TAHUN 2026, DIPERSILAHKAN

PLT. SEKRETARIS DEWAN
(MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN PROPEMPERDA TAHUN 2026)

5. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PROPEMPERDA TAHUN 2026, UNTUK ITU APAKAH PARIPURNA DAPAT MENSETUJUI RANCANGAN SK TERSEBUT ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PIMPINAN DPRD DENGAN BUPATI.

PIMPINAN DEWAN DAN BUPATI

(MENANDATANGANI PERSETUJUAN BERSAMA)

6. PIMPINAN RAPAT

ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

DEMI TERTIBNYA ACARA PENYAMPAIAN INI, KAMI PERSILAHKAN KEPADA MASING-MASING FRAKSI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SECARA BERURUTAN SEBAGAI JURU BICARA YANG AKAN MEMBACAKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA YAITU :

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - FRAKSI GERINDRA | SDR, EDO SAPUTRA WIJAYA, S.H., M.H. |
| - FRAKSI PDI-PERJUANGAN | SDR, SAMSUL H. SUHARTONO |
| - FRAKSI GOLKAR | SDR, PRAMADJI NANDYAN INGGARJITO |
| - FRAKSI P A N | SDR, H. WIDODO |
| - FRAKSI PKB | SDR, ISMAIL |
| - FRAKSI DEMOKRAT | SDR, ACHMAD JOHANI, A.Md |
| - FRAKSI NASDEM | SDR, H. SLAMET NURIMAN |
| - FRAKSI P K S | SDR, DEDE SUHENDAR, S.Pd., M.Pd. |

KEPADA SDR. YANG MEWAKILI MASING-MASING FRAKSI DIPERSILAHKAN MENYAMPAIKANNYA.

FRAKSI-FRAKSI

(MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA)

7. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MEWAKILI MASING-MASING FRAKSINYA DALAM MENYIKAPI LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, SEHINGGA TERDAPAT BEBERAPA CATATAN, SARAN DAN MASUKAN YANG KONSTRUKTIF UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH PIHAK EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

ACARA YANG KE-EMPAT YAITU KESIMPULAN, SEBELUM MENYIMPULKAN RAPAT PADA HARI INI, BAIKLAH AKAN DIULAS DASAR UNTUK MENGAMBIL KESIMPULAN RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI SEBAGAI BERIKUT :

PERTAMA : LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD ATAS PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

KEDUA : PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YAITU :

- FRAKSI GERINDRA	MENYETUJUI
- FRAKSI PDI-PERJUANGAN	MENYETUJUI
- FRAKSI GOLKAR	MENYETUJUI
- FRAKSI P A N	MENYETUJUI
- FRAKSI PKB	MENYETUJUI
- FRAKSI DEMOKRAT	MENYETUJUI
- FRAKSI NASDEM	MENYETUJUI
- FRAKSI P K S	MENYETUJUI

MAKA KESIMPULAN RAPAT KITA PADA HARI INI ADALAH **MENYETUJUI** LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD ATAS PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, UNTUK DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

DEMI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT APAKAH PARIPURNA DAPAT MENYETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT SEKRETARIS DEWAN GUNA MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DIPERSILAHKAN.

PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN RANCANGAN SURAT KEPUTUSAN DPRD)

8. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. P.LT SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DEMI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT MAKA SAYA TAWARKAN KEMBALI APAKAH RAPAT PARIPURNA DAPAT MENYETUJUI KEPUTUSAN DEWAN TERSEBUT ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PIMPINAN DPRD DENGAN BUPATI.

PIMPINAN DEWAN DAN BUPATI

(MENADATANGANI BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA)

ACARA YANG KE-LIMA YAITU ADALAH SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, KEPADA SDR. BUPATI KAMI PERSILAHKAN.

BUPATI LAMPUNG SELATAN
(MENYAMPAIKAN SAMBUTANYA)

9. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA ATAS PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

DENGAN TELAH DISAMPAIKANNYA SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TERSEBUT, MAKA SELANJUTNYA MARILAH KITA IKUTI LAGU KEBANGSAAN BAGIMU NEGERI, KEPADA HADIRIN DIMOHON UNTUK BERDIRI.

10. PIMPINAN RAPAT

HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

SEBELUM MENUTUP ACARA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN, PARA ANGGOTA DEWAN, ANGGOTA FORKOPIMDA, SEKRETARIS DAERAH BESERTA JAJARANNYA DAN HADIRIN UNDANGAN YANG TELAH MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PADA HARI INI, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP, " **ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN** " RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026. **RAPAT SECARA RESMI DITUTUP,**

-----KETUKAN PALU 3 KALI -----

**TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,
BILLAHITAUFIQ WAL-HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

VII. PENUTUP

Demikian Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kalianda, 26 November 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


ERMA YUSNELI, S.E., M.M.

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


ACHMAD HERRY, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19711230 200003 1 002



PANDUAN ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP
RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026
RABU, 26 NOVEMBER 2025

1. PIMPINAN RAPAT

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

***SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA
SEMUA, SYALOM, OHM SWASTIASTU, NAMO BUDAYA,
SALAM KEBAJIKAN, TABIK PUUN.....***

SEBELUM RAPAT PARIPURNA HARI INI DIBUKA SECARA RESMI,
GUNA MENANAMKAN RASA KEBANGSAAN MARILAH KITA IKUTI
BERSAMA LAGU INDONESIA RAYA DAN DILANJUTKAN MARS
LAMPUNG SELATAN, KEPADA PARA HADIRIN DIMOHON UNTUK
BERDIRI, DIPERSILAHKAN.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA DAN MARS LAMPUNG
SELATAN).

2. PIMPINAN RAPAT.

TERIMA KASIH, HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

UNTUK SELANJUTNYA SESUAI DENGAN TATA TERTIB DPRD KAB.
LAM-SEL, KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS
DEWAN UNTUK MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA
DEWAN YTH. DAN MEMBACAKAN SURAT MASUK YANG
BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA PADA
HARI INI, DIPERSILAHKAN



PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH, DAN
SURAT-SURAT MASUK)

3. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA PLT. SEKRETARIS DEWAN
YANG TELAH MEMBACAKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA
DEWAN YTH. DAN SURAT-SURAT MASUK SEBAGAI DASAR
PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI,
MENGINGAT SAAT INI TELAH HADIR⁴⁰..... ORANG
ANGGOTA DEWAN YTH, DENGAN DEMIKIAN QOURUM RAPAT
PARIPURNA TELAH TERPENUHI, MAKA DENGAN
MENGUCAP, "**BISMILLAHIR ROHMANIRROHIM**" RAPAT
PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, MASA
PERSIDANGAN KE-TIGA RAPAT KE-25 TAHUN SIDANG 2025,
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP
RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026.

**UNTUK ITU SKORS RAPAT DICABUT, MAKA RAPAT SECARA
RESMI DIBUKA DAN DINYATAKAN TERBUKA UNTUK
UMUM.**

-----**KETUKAN PALU 3 KALI**-----



YTH. SDR. BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN.
YTH. SDR. PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YTH.
YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN, SEKDAKAB SERTA PARA STAF
AHLI BUPATI, PARA ASISTEN, INSPEKTUR,
PARA KEPALA DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA
BAGIAN DAN CAMAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
SDR. ALIANSI LAMPUNG SELATAN BERSATU, INSAN
PERS, HADIRIN PARA UNDANGAN YANG KAMI
MULIAKAN.

MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KE HADIRAT
ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS LIMPAHAN
RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA MASIH DIBERIKAN
KESEHATAN DAN KEKUATAN UNTUK MENJALANKAN SEGALA
AKTIFITAS PADA HARI INI, SEBAGAI TINDAK LANJUT PARIPURNA
DEWAN PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2025, DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DAN DITINDAKLANJUTI
PEMBAHASAN OLEH BADAN ANGGARAN DPRD BERSAMA TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) SERTA OPD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

UNTUK ITU DIHARAPKAN PADA RAPAT HARI INI BADAN
ANGGARAN DPRD DAPAT MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS HASIL
PEMBAHASAN RANCANGAN APBD TERSEBUT, SELANJUTNYA
BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD PADA
TANGGAL 27 OKTOBER 2025,



ANTARA LAIN MENETAPKAN RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2026, DENGAN SUSUNAN ACARA SEBAGAI BERIKUT :

1. SKORS RAPAT (DICABUT).
2. LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD.
3. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD.
4. KESIMPULAN / PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA.
5. SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
6. PENUTUP.

DEMI MUSYAWARAH MUFAKAT APAKAH SUSUNAN ACARA
TERSEBUT DAPAT DISETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

**YTH. SDR. BUPATI LAMPUNG SELATAN
PARA HADIRIN, UNDANGAN YANG KAMI MULIAKAN.**

ACARA YANG KE-DUA YAITU LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD
ATAS HASIL PEMBAHASAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN
2026, KEPADA PERSONIL BADAN ANGGARAN DPRD,
DIPERSILAHKAN.

BADAN ANGGARAN
(MENYAMPAIKAN LAPORANNYA)



5

4. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. *Janggis Khan Haikal, SH, MH* PERSONIL BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG TELAH MENYAMPAIKAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2026.

SEBELUM ACARA YANG KE-TIGA YAITU PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN SURAT MASUK DARI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL 31 OKTOBER 2025, YANG MENYAMPAIKAN TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026 DAN SURAT MASUK DARI KOMISI IV DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TANGGAL 25 NOVEMBER 2025, PERIHAL PENYAMPAIAN USUL RANPERDA INISIATIF DEWAN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN UNTUK DITETAPKAN DALAM PROPEMPERDA 2026, DAN HAL INI TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH BAPEMPERDA DPRD MELALUI RAPAT BAPEMPERDA DENGAN OPD YANG MENANGANI BIDANG HUKUM TANGGAL 26 NOVEMBER 2025, MAKA PROPEMPERDA 2026 PERLU DISEPAKATI UNTUK DIUMUMKAN DAN DITETAPKAN DALAM RAPAT PARIPURNA.

MENINGAT SESUAI PASAL 239 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN SESUAI PASAL 15 AYAT (4) PERMENDAGRI 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, DIJELASKAN BAHWA "PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILAKUKAN SETIAP TAHUN SEBELUM PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD",



6

MAKA PENETAPAN PROPEMPERDA TAHUN 2026 AKAN DISEPAKATI SEBELUM APBD DITETAPKAN, UNTUK ITU APAKAH PARIPURNA DAPAT MENSETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----

----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

SELANJUTNYA KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS DEWAN UNTUK MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PERSETUJUAN PROPEMPERDA TAHUN 2026, DIPERSILAHKAN

PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN PROPEMPERDA TAHUN 2026)

5. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. PLT. SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) PROPEMPERDA TAHUN 2026, UNTUK ITU APAKAH PARIPURNA DAPAT MENSETUJUI RANCANGAN SK TERSEBUT ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----

----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PIMPINAN DPRD DENGAN BUPATI.

PIMPINAN DEWAN DAN BUPATI

(MENADATANGANI PERSETUJUAN BERSAMA)

6. PIMPINAN RAPAT

ACARA BERIKUTNYA ADALAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.



DEMI TERTIBNYA ACARA PENYAMPAIAN INI, KAMI PERSILAHKAN KEPADA MASING-MASING FRAKSI UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SECARA BERURUTAN SEBAGAI JURU BICARA YANG AKAN MEMBACAKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA YAITU :

- | | |
|-------------------------|---|
| - FRAKSI GERINDRA | SDR, <i>Edo Saputra Wijaya, Sdr. Ut</i> |
| - FRAKSI PDI-PERJUANGAN | SDR, <i>Samsul H. Suhartono</i> |
| - FRAKSI GOLKAR | SDR, <i>Pramadji N. Igganjito</i> |
| - FRAKSI P A N | SDR, <i>H. Widodo</i> |
| - FRAKSI PKB | SDR, <i>ISMAIL</i> |
| - FRAKSI DEMOKRAT | SDR, <i>Achmad Dahlan, A.Md</i> |
| - FRAKSI NASDEM | SDR, <i>H. Slamet Nurman</i> |
| - FRAKSI P K S | SDR, <i>Dede Suhendar, S.Pd. Mpd</i> |

KEPADA SDR. YANG MEWAKILI MASING-MASING FRAKSI DIPERSILAHKAN MENYAMPAIKANNYA.

FRAKSI-FRAKSI

(MENYAMPAIKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSINYA)

7. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA PARA ANGGOTA DEWAN YANG TELAH MEWAKILI MASING-MASING FRAKSINYA DALAM MENYIKAPI LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PEMBAHASAN RANPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026, SEHINGGA TERDAPAT BEBERAPA CATATAN, SARAN DAN MASUKAN YANG KONSTRUKTIF UNTUK DITINDAKLANJUTI OLEH PIHAK EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.



ACARA YANG KE-EMPAT YAITU KESIMPULAN, SEBELUM MENYIMPULKAN RAPAT PADA HARI INI, BAIKLAH AKAN DIULAS DASAR UNTUK MENGAMBIL KESIMPULAN RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI SEBAGAI BERIKUT :

- PERTAMA : LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD ATAS PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.
- KEDUA : PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YAITU :

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - FRAKSI GERINDRA | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI PDI-PERJUANGAN | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI GOLKAR | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI P A N | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI PKB | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI DEMOKRAT | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI NASDEM | MENYETUJUI/ MENOLAK |
| - FRAKSI P K S | MENYETUJUI/ MENOLAK |

MAKA KESIMPULAN RAPAT KITA PADA HARI INI ADALAH **MENYETUJUI/ ~~MENOLAK~~** LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD ATAS PEMBAHASAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, UNTUK DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

DEMI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT APAKAH PARIPURNA DAPAT MENYETUJUI ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
 ----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----



9

UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. PLT SEKRETARIS DEWAN GUNA MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, DIPERSILAHKAN.

PLT. SEKRETARIS DEWAN

(MEMBACAKAN RANCANGAN SURAT KEPUTUSAN DPRD)

8. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. PLT SEKRETARIS DEWAN YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026, DEMI MUSYAWARAH DAN MUFAKAT MAKA SAYA TAWARKAN KEMBALI APAKAH RAPAT PARIPURNA DAPAT MENYETUJUI KEPUTUSAN DEWAN TERSEBUT ?

----- **RAPAT PARIPURNA SETUJU** -----
----- **KETUKAN PALU 1 KALI** -----

UNTUK SELANJUTNYA AKAN DILAKSANAKAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA PIMPINAN DPRD DENGAN BUPATI.

PIMPINAN DEWAN DAN BUPATI

(MENANDATANGANI BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA)

ACARA YANG KE-LIMA YAITU ADALAH SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN, KEPADA SDR. BUPATI KAMI PERSILAHKAN.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

(MENYAMPAIKAN SAMBUTANYA)



10

9. PIMPINAN RAPAT

TERIMA KASIH KEPADA SDR. BUPATI YANG TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA ATAS PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

DENGAN TELAH DISAMPAIKANNYA SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TERSEBUT, MAKA SELANJUTNYA MARILAH KITA IKUTI LAGU KEBANGSAAN BAGIMU NEGERI, KEPADA HADIRIN DIMOHON UNTUK BERDIRI.

10. PIMPINAN RAPAT

HADIRIN DIPERSILAHKAN DUDUK KEMBALI.

SEBELUM MENUTUP ACARA RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SAUDARA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN, PARA ANGGOTA DEWAN, ANGGOTA FORKOPIMDA, SEKRETARIS DAERAH BESERTA JAJARANNYA DAN HADIRIN UNDANGAN YANG TELAH MENGIKUTI JALANNYA RAPAT PADA HARI INI, AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP, " **ALHAMDULILLAH ROBBIL ALAMIN** "

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

RAPAT SECARA RESMI DITUTUP,

----- **KETUKAN PALU 3 KALI** -----

**TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,
BILLAHITAUFIQ WAL-HIDAYAH
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

**MOHON IZIN BAPAK BUPATI DAN BAPAK WAKIL BUPATI
PIMPINAN DEWAN DAN PARIPURNA DEWAN YTH.**

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA HARI INI RABU, TANGGAL 26 NOVEMBER 2025, DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN JUMLAH KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN YTH DAN SURAT-SURAT MASUK SBB:

DARI JUMLAH **50** ANGGOTA DEWAN YTH.

TELAH HADIR SEBANYAK **40** ORANG, DENGAN RINCIAN SBB :

TIDAK HADIR **10** ORANG.

KETERANGAN TIDAK HADIR:

SAKIT :.....**2**.....ORANG

IZIN :.....**8**.....ORANG

DIPERJALANAN :.....ORANG

TANPA KET. :.....ORANG

ADAPUN SURAT MASUK ADALAH:



**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)**

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No.02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727)
322107

Kalianda, 26, November 2025

Nomor : 4.0.0.4.1.4/ 334 / II.01 / XI/ 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : **Laporan Badan Anggaran
DPRD Kab. Lampung Selatan Terhadap
hasil pembahasan Ranperda APBD T.A. 2026**

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Lampung Selatan
di

KALIANDA

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terhadap Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, *(terlampir)*, yang telah dilaksanakan dari tanggal 19 November s.d 25 November 2025, kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam Pengambilan Keputusan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
Wakil Ketua Ex Officio


MERIK HAVIT, S.H., M.H.



**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(BAPEMPERDA)**

3

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jalan Zainal Abidin Pagaram No.02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

Kalianda, 26 November 2025

Nomor : BAPEMPERDA/DPRD-LS/ 03 /XI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Pembahasan
Propemperda Tahun 2026

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
di-
Kalianda

Sehubungan dengan telah selesainya Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan membahas perihal Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan berita acara hasil pembahasan Propemperda Tahun 2026 dimaksud (terlampir), untuk menjadi bahan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


YUDI SUPRAYOGA



BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No.02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

BERITA ACARA

NOMOR : 02 /BAPEMPERDA/DPRD-LS/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kalianda dalam acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disingkat Bapemperda) DPRD Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan sebagai berikut :

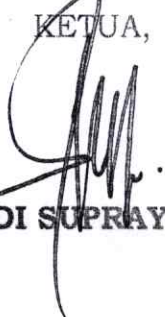
1. Bahwa Bapemperda DPRD Kabupaten Lampung Selatan telah melakukan penelitian, pembahasan dan dilakukan sesuai dengan asas, kaidah dan norma yang berlaku terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, yaitu :
 - A. Propemperda skala prioritas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan tentang :
 1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa
 2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 3. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan dan permukiman
 4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan
 5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045
 6. Penyelenggaraan Jalan Daerah
 7. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 8. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
 - B. Propemperda Kumulatif terbuka Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tentang :
 1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
 2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
 3. APBD Tahun Anggaran 2027
 - C. Propemperda Inisiatif DPRD Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tentang :
 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

2. Bahwa Ranperda Kabupaten Lampung Selatan tersebut diatas, telah dilakukan juga penyesuaian, penyelarasan dan harmonisasi terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang juga mengatur tentang Produk Hukum Daerah serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bahwa atas pelaksanaan penyusunan dan pembentukan Propemperda sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut diatas, maka disepakati untuk ditetapkan sebagai Propemperda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 26 November 2025

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

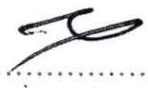
KETUA,

YUDI SUPRAYOGA

WAKIL KETUA,

SLAMET NURIMAN

ANGGOTA BAPEMPERDA

1. **FARIZAL PURBA, S.E.**
2. **EDO SAPUTRA WIJAYA, S.H., M.H.**
3. **SUHAR PUJIANTO**
4. **ASMARA, S.Pd.**
5. **AHMAD AL-AKHRAN, S.S.**
6. **DERRI KUSUMA, S.E.**
7. **Hj. RUSDIANTI**
8. **WIDODO**
9. **MISMAN**
10. **AYU KUMALA SARI, S.H.**
11. **AHMAD JOHANI, A.Md.**
12. **SUHADIRIN**
13. **KASMANI, S.T., M.Si.**

1.....	
2.....	
3.....	
4.....	
5.....	
6.....	
7.....	
8.....	
9.....	
10.....	
11.....	
12.....	
13.....	

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

RAHASIA ☐

PENTING ☐

RUTIN ☐

Indek : Kode :

Perihal/ Isi Ringkas : Penyampaian ProPemporda Kab. Lamser
thn 2026

Tgl. No. Surat : 31 Oktober 2025

Asal : Setda

Tgl. / No. Agenda : 4 November 2025 / 724

Instruksi/ Informasi *)

Diteruskan Kepada :

Kepada yth KETUA DPRD

perihal : penyampaian prokem-
perda Kab. Lam-sel
Tahun 2026

5/2025
/10

SDR Subwan ltr

Proses Segwa mebanesa

11-11-2025.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4 NOV 2025

lemb parliheri

y di hndak bngki

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

Kalianda, 31 Oktober 2025

Nomor : 100.3.2 / 9950 / 1.03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian Propemperda
Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2026
Yth : Ketua DPRD Kab. Lampung
Selatan
di-
Tempat

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 dan 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dan sehubungan telah selesainya penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, bersama ini kami sampaikan dan mohon kiranya untuk dapat ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 (terlampir).

Demikian atas perkenannya dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Bupati Lampung Selatan
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan,



Supriyanto, S.Sos., M.M
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19690720 199101 1 001

Tembusan, Yth:
Bupati Lampung Selatan

A. Propemperda skala prioritas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 :

No.	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa	Dinas PMD	
2.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim	
3.	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan dan permukiman	Dinas Perkim	
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan	Dinas TPH dan Bun	
5.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045	Dinas PUPR	
6.	Penyelenggaraan Jalan Daerah	Dinas PUPR	
7.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPRD	
9.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkim	

B. Propemperda Kumulatif terbuka Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026

No.	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	BPKAD	
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	BPKAD	
3.	APBD Tahun Anggaran 2027	BPKAD	

a.n Bupati Lampung Selatan
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Selatan,



Supriyanto, S.Sos., M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19690720 199101 1 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

Kalianda, 25 November 2025

Nomor : 4.0.0.4.1.4/ 332 / II.OI / ~~XI~~ / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Usul Ranperda Inisiatif Dewan
tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren**

Kepada
Ketua DPRD
Kabupaten Lampung Selatan
di

KALIANDA

Berdasarkan rapat internal Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 November 2025, membahas Usulan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, tujuan diusulkan rancangan peraturan daerah ini untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakatnya sesuai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta mempertimbangkan dan tindak lanjut telah diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Selatan, pada pasal 149 ayat (1) dijelaskan bahwa Ranperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi dan Bapemperda, untuk itu bersama ini Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan sesuai bidang dan kewenangannya, dengan ini menyampaikan usul ranperda dimaksud untuk ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMISI IV
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Ketua,

Sekretaris


T A M A N


AGUS SARTONO, SE.

Tembusan Yth.

- Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan

L A P O R A N

**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DISAMPAIKAN PADA :

**RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

KALIANDA, 26 NOVEMBER 2025



**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Jalan Zainal Abidin Pagaram No.02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

LAPORAN : BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat dan rekan-rekan Anggota DPRD Kab Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi / Badan dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Ketua TP. PKK, Dharma wanita dan organisasi wanita se-Kabupaten Lampung Selatan

Yth. Sdr. Insan Pers baik cetak maupun elektronik serta hadirin undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum WR.WB.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Tabik Puun.....

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas Berkat limpahan Rahmat dan Ridho-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga bisa bersama-sama bersilaturahmi di ruangan ini, dalam rangka menghadiri Rapat Paripurna Lanjutan DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, yang pembahasannya telah dilaksanakan bersama pihak Pemerintah Daerah.

Ucapan Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mitra kerja (Dinas, Badan, Bagian dan Kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, kami ucapkan terima kasih atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diberikan pada saat pembahasan. Semoga hasil pembahasan ini menjadi bermanfaat dan berguna dalam proses pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Aamiin...

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.
Sdr. Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Menindak lanjuti hasil pembahasan yang telah dilaksanakan maka Laporan ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN.

II. DASAR HUKUM.

III. MATERI PEMBAHASAN.

IV. HASIL PEMBAHASAN.

V. KESIMPULAN DAN SARAN.

VI. PENUTUP.

I. PENDAHULUAN

Sdr. Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.
Sdr. Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Setelah melalui proses Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan DPRD Kabupaten Lampung Selatan tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, maka disusunlah Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sebuah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan merupakan suatu gambaran perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah dalam satu tahun anggaran serta gambaran perkiraan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Dalam pelaksanaannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbasis pada sistem anggaran kinerja merupakan suatu sistem penganggaran yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan efisiensi dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan dasar pijakan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan daerah.

Salah satu pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, adalah pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan dengan tetap mengutamakan kuantitas dan kualitas yang terukur, sehingga muara pencapaian hasil melalui program dan kegiatan baik berupa Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga maupun Belanja Transfer dapat dimaksimalkan.

II. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 57);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 105);
25. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
40. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
41. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305);
47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
49. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
50. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /KM.7/2024 Tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
52. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15);
57. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 Nomor 325).

III.MATERI PEMBAHASAN.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Rapat Paripurna tanggal 12 November 2025 yang menjadi materi pembahasan Badan Anggaran adalah :

1. Penyampaian Nota Pengantar Keuangan tentang Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
3. Tanggapan/jawaban Bupati Lampung Selatan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas/Instansi terkait dari tanggal 19 November s.d 25 November 2025.

IV.HASIL PEMBAHASAN

**Sdr.Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.
Sdr.Bupati dan hadirin yang berbahagia.**

Secara umum dapat kami laporkan bahwa dalam pembahasan yang dilaksanakan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD terkait, berjalan dengan baik dan lancar, selain itu dalam pembahasan terdapat tanya jawab yang terkesan mendetail, namun hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua dalam mengambil keputusan atau kebijakan menyangkut Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, artinya alokasi dana pembangunan diharapkan akan lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, hal ini harus kita jaga terus menerus dalam pembahasan anggaran selanjutnya.

Berkaitan dengan anggaran yang diajukan, selama pembahasan kita semua sadar bahwa memang kebutuhan atau kepentingan masyarakat tidak dapat semua kita penuhi dengan anggaran yang kita miliki, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran harus dikedepankan namun tetap skala prioritas pada bidang kesehatan, Pendidikan, Sosial, Keagamaan, infrastruktur. maupun sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Dan upaya ini sepertinya sudah menjadi keinginan bersama sehingga rasa kerjasama dan saling pengertian serta rasa tanggungjawab mewarnai pembahasan yang telah kita laksanakan.

Dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, akhirnya dapat disepakati adanya penyempurnaan dan perbaikan belanja dan pembiayaan yang disebabkan adanya penataan antar kegiatan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026**, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 428.280.414.612,00
(428 Milyar 280 Juta 414 Ribu 612 Rupiah)	
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.674.400.598.000,00
(1 Trilyun 674 Milyar 400 Juta 598 Ribu Rupiah)	
Jumlah Pendapatan Daerah	Rp. 2.102.681.012.612,00
(2 Trilyun 102 Milyar 681 Juta 012 Ribu 612 Rupiah)	

2. Belanja Daerah

Jumlah Belanja Daerah	Rp. 2.204.448.012.612,00
(2 Trilyun 204 Milyar 448 Juta 012 Ribu Rupiah)	
Surplus/(Defisit)	Rp. (101.767.000.000,00)
(101 Milyar 767 Juta Rupiah)	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 125.000.000.000,00
(125 Milyar Rupiah)	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. <u>23.233.000.000,00</u>
(23 Milyar 233 Juta Rupiah)	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 101.767.000.000,00
(101 Milyar 767 Juta Rupiah)	
SILPA	Rp. 0,00
(Nol)	

Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta dengan kerjasama yang baik dan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan memperhatikan usulan RKA masing-masing OPD, sehingga dalam pembahasan terjadi penyempurnaan berupa penataan pada masing-masing OPD, maka hasil pembahasan tersebut tercapai suatu kesepakatan yang telah tergambarkan secara garis besar dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang telah disebutkan sebagaimana tersebut diatas.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan tadi, maka Badan Anggaran dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. KESIMPULAN :

1. Bahwa proses pembahasan dilaksanakan dari tanggal 19 November sampai dengan 25 November 2025, berjalan baik dan lancar.
2. Hasil Pembahasan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Rp. 2.102.681.012.612,00
<i>(2 Trilyun 102 Milyar 681 Juta 012 Ribu 612 Rupiah)</i>	

Belanja Daerah	Rp. 2.204.448.012.612,00
<i>(2 Trilyun 204 Milyar 448 Juta 012 Ribu 612 Rupiah)</i>	

Surplus/(Defisit)	Rp. (101.767.000.000,00)
<i>(101 Milyar 767 Juta Rupiah)</i>	

Pembiayaan	Rp. 101.767.000.000,00
<i>(101 Milyar 767 Juta Rupiah)</i>	

SILPA	Rp.	0,00
<i>(Nol)</i>		

B. SARAN :

Berdasarkan paparan Materi Pembahasan, Hasil Pembahasan serta Kesimpulan yang sebelumnya telah disampaikan dan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan OPD terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka terdapat hal-hal yang perlu kami sarankan untuk mendapat pertimbangan dan perhatian dari Bupati Lampung Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah bahwa dalam situasi dinamika fiskal nasional dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, agar tetap menjaga prioritas alokasi belanja pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, menyatukan prinsip dengan keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen untuk pelayanan kepada Masyarakat Lampung Selatan.

2. Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menyeimbangkan kebutuhan Belanja Daerah ditengah penyesuaian transfer dari pemerintah pusat, maka diperlukan Optimalisasi Peningkatan Sektor Pendapatan Daerah, dalam hal menetapkan target pendapatan asli daerah agar lebih realistis, terukur dengan tetap optimis dalam pencapaiannya, untuk itu diperlukan kerja keras masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberi amanah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah.
3. Dalam strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, disarankan perlu memperkuat basis data dengan pemanfaatan teknologi digitalisasi sehingga data yang dihasilkan akurat diimbangi dengan SDM yang mumpuni, menggali potensi sumber PAD dari BUMD sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata dalam meningkatkan PAD, selain itu perlu pengembangan sektor pariwisata dan menumbuh kembangkan UMKM dan pembenahan regulasi untuk direvisi disesuaikan dengan kondisi saat ini, serta pengawasan lapangan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kebocoran.

VI. PENUTUP.

Demikian Laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam pengambilan keputusan.

Kepada mitra eksekutif serta semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Badan Anggaran, kami ucapkan banyak terimakasih, semoga apa yang kita kerjakan mendapat Ridho dan Hidayah dari Allah SWT, amin. Bismilah Bisa

Akhirnya perkenankanlah kami menghaturkan maaf, apabila terdapat kekurangan dalam pembahasan maupun penyampaiannya. Sekian dan terimakasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum WR.WB.

Kalianda, 26 November 2025

BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ERMA YUSNELI, S.E., M.M.	Ketua Ex Oficio	1.....
2	MERIK HAVIT, S.H., M.H.	Wakil Ketua Ex Oficio	2.....
3	A.BENNY RAHARJO, S.H.	Wakil Ketua Ex Oficio	3.....
4	BELA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A	Wakil Ketua Ex Oficio	4.....
5	AMELIA NANDA SARI, SH., M.H.	Anggota	5.....
6	WARIS BASUKI, S.H.	Anggota	6.....
7	YUTI RAMAYANTI	Anggota	7.....
8	HENDRY GUNAWAN	Anggota	8.....
9	TAMAN	Anggota	9.....
10	SAMSUL H. SUHARTONO	Anggota	10.....
11	SYAIFUL AZUMAR, S.H., M.H.	Anggota	11.....
12	Hi. SIDIK MARYANTO, S.Sos	Anggota	12.....
13	AHMAD MUSLIM, A.M, S.E.	Anggota	13.....
14	AGUS SARTONO, S.E.	Anggota	14.....
15	EDY WALUYO, S.T.	Anggota	15.....
16	BAYU PRASETYA, S.E.	Anggota	16.....
17	H. SUTAJI ABDULLAH	Anggota	17.....
18	ISMAIL	Anggota	18.....
19	YUDI SUPRAYOGA	Anggota	19.....
20	JENGGIS KHAN HAIKAL, S.H., M.H.	Anggota	20.....
21	FITRI PURWANTI, S.T., M.T.	Anggota	21.....
22	M. GILANG SATRIA RIYANDI, S.E.,M.M.	Anggota	22.....
23	POLMAN SINAGA, S.H.	Anggota	23.....
24	H. BOWO EDY ANGGORO, S.E.	Anggota	24.....
25	DEDE SUHENDAR, S.Pd., M.Pd	Anggota	25.....
26	ACHMAD HERRY, S.E., M.M.	Sek. Bukan Anggota	26.....



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 28 /DPRD-LS/2025**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, agar dapat tersusun secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu dibentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 100.3.2/ 9950/ I.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025, perihal Penyampaian Propemperda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026;

2. Surat Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4.0.0.4.1.4/ 332/II.01/XI/2025, tanggal 25 November 2025, perihal Penyampaian Usul Ranperda Inisiatif Dewan tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

3. Hasil musyawarah dan Mufakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 26 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas terhadap rencana pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada sistem komulatif terbuka;
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, dan;
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani Bidang Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. Perintah dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEEMPAT : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 26 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



ERMA YUSNELI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

A. Propemperda skala prioritas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 :

No.	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa	Dinas PMD	
2.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas Perkim	
3.	Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan dan permukiman	Dinas Perkim	
4.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan	Dinas TPH dan Bun	
5.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045	Dinas PUPR	
6.	Penyelenggaraan Jalan Daerah	Dinas PUPR	
7.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD	
8.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	BPPRD	
9.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Dinas Perkim	

B. Propemperda Kumulatif terbuka Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026

No.	JUDUL RANPERDA	OPD PEMRAKARSA	KET
1.	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	BPKAD	
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	BPKAD	
3.	APBD Tahun Anggaran 2027	BPKAD	

C. Propemperda Inisiatif DPRD Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tentang :

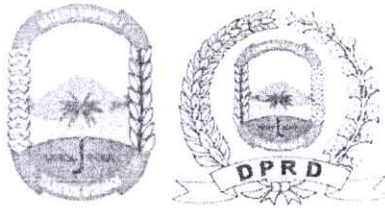
No.	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KET
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ERMA YUSNELI

Tembusan :

- 1. Gubernur Lampung di Teluk Betung
- 2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda



BERITA ACARA

Nomor : 7/PB /HK / 2025

Nomor : 16/PB/DPRD-LS/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI LAMPUNG SELATAN DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kalianda dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RADITYO EGI PRATAMA** : Bupati Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2.
 - a. **ERMA YUSNELI** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. **MERIK HAVIT** : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 - c. **BENNY RAHARJO** : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 - d. **BELLA JAYANTI** : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026 sebanyak 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari :

A. Propemperda skala prioritas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan tentang :

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa
2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
3. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Perumahan dan permukiman
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Selatan
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2045
6. Penyelenggaraan Jalan Daerah
7. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

B. Propemperda Kumulatif terbuka Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tentang :

1. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
3. APBD Tahun Anggaran 2027

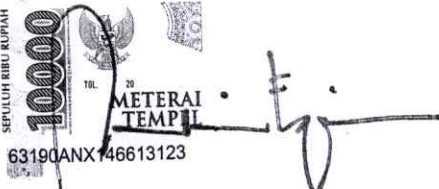
C. Propemperda Inisiatif DPRD Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Lampung Selatan Tentang :

1. Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
2. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan skala prioritas terhadap rencana pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah dengan tetap mengacu pada sistem komulatif terbuka.
3. Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, dalam hal :
 - a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
 - b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain, dan;
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani Bidang Hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. Perintah dari ketentuan peraturan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 26 November 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RADITYO EGI PRATAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA


ERMA YUSNELI
WAKIL KETUA I


MERIK HAVIT

WAKIL KETUA II


BENNY RAHARJO

WAKIL KETUA III


BELLA JAYANTI

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI
PARTAI GERINDRA**



DISAMPAIKAN :

**DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Kalianda, 26 November 2025



FRAKSIFRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 02 kalianda Lampung Selatan 35513

Telp. (0721) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Indonesia Raya*

*Salam Kebajikan
Om Swasti Astu
Name budaya
Shalom
Tabik pun...*

- Yth. Sdr. Bupati Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Wakil Bupati Lampung Selatan
Yth. Sdri. Pimpinan serta Rekan-Rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Yth. Sdr. Ketua TP. PKK, Dharma wanita Pimpinan Parpol, Ormas, serta rekan-rekan Insan Pers baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati.

Marilah kita Panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya jugalah kita dapat berasama-sama bersilaturahmi dan berkumpul di Ruangan Paripurna ini dalam keadaan sehat wal-afiat, dengan agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Rangka Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan atau yang mewakili.

Selanjutnya Shollowat dan Salam juga tidak lupa selalu kita panjatkan Kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan Syafa'atnya di Hari Akhir nanti, Aamiin yarobbal alamin.

Kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra .

**Sdri. Pimpinan dan Anggota Dewan Yth.
Sdr. Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang kami hormati.**

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun dalam proses pembahasan yang dilaksanakan dari tanggal 19 November sampai dengan 25 November 2025, berjalan baik dan lancar.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, artinya alokasi dana pembangunan diharapkan akan lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, hal ini harus kita jaga terus menerus dalam pembahasan anggaran selanjutnya.

Berkaitan dengan anggaran yang diajukan, memang kebutuhan atau kepentingan masyarakat tidak dapat semua kita penuhi dengan anggaran yang kita miliki, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran harus dikedepankan namun tetap skala prioritas pada bidang kesehatan, Pendidikan, Sosial, Keagamaan, infrastruktur maupun sektor yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Dan upaya ini sepertinya sudah menjadi keinginan bersama sehingga kerjasama dan saling pengertian serta rasa tanggungjawab mewarnai pembahasan yang telah kita laksanakan.

Dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan, akhirnya dapat disepakati adanya penyempurnaan dan perbaikan belanja dan pembiayaan yang disebabkan adanya penataan antar kegiatan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026**, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.102.681.012.612,00. terbilang (2 Trilyun 102 Milyar 681 Juta 12 Ribu 612 Rupiah);
2. Belanja Daerah sebesar Rp 2.204.448.012.612,00. terbilang (2 Trilyun 204 Milyar 448 Juta 12 Ribu 612 Rupiah);
3. Terdapat Surplus/(Defisit) sebesar Rp 101.767.000.000,00. terbilang (101 Milyar 767 Juta Rupiah);
4. Pembiayaan sebesar Rp 101.767.000.000,00. terbilang (101 Milyar 767 Juta Rupiah);
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah Rp 0,00 (Nol).

Berdasarkan Hasil Pembahasan serta Kesimpulan yang sebelumnya telah disampaikan dan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan OPD terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka terdapat hal-hal yang perlu untuk mendapat pertimbangan dan perhatian dari Bapak Bupati Lampung Selatan yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas Belanja Pelayanan Dasar: Disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga prioritas alokasi belanja pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Komitmen untuk pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang meskipun ada efisiensi anggaran;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Target PAD harus lebih realistis, terukur, dan optimis, serta membutuhkan kerja keras dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Memperkuat basis data dengan pemanfaatan teknologi digitalisasi agar data akurat diimbangi dengan penyediaan SDM yang mumpuni;
4. Menggali potensi sumber PAD dari BUMD Kabupaten Lampung Selatan;
5. Mengembangkan sektor pariwisata dan menumbuhkan kembangkan UMKM di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan;
6. Melakukan pembenahan regulasi agar disesuaikan dengan kondisi saat ini;
7. Melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengantisipasi kebocoran anggaran.

Pada penghujung pendapat akhir Fraksi Partai Gerindra hari ini, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mitra kerja (Dinas, Badan, Bagian dan Kecamatan) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Semoga hasil pembahasan ini menjadi bermanfaat dan berguna dalam proses pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kami kembali mengingatkan agar kita tetap solid dalam semangat kebersamaan untuk memberikan kinerja dan pelayanan terbaik bagi kabupaten lampung selatan yang kita cintai. Akhirnya dengan mengucap "*Bisnullohirrohmanirrohim*" Fraksi Gerindra **Menerima dan Menyetujui** Perda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 Untuk disahkan Bersama-sama Bupati Kabupaten Lampung Selatan dengan Anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PARTAI GERINDRA kami sampaikan, Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan niat yang baik, dilakukan dengan cara yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya Masyarakat Lampung Selatan, Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih serta permohonan maaf apabila terdapat perkataan yang khilaf dan kurang pas yang telah kami sampaikan, kepada Allah kami mohon ampun dan terimalah karya persembahan terbaik sebagai Putra/ Putri Bangsa bagi ibu pertiwi Indonesia Raya.

*Wabillahir Taufiq Wal Hidayah
Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Kalianda, 26 November 2025

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Ketua Fraksi,



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PERMUKILAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Sekretaris Fraksi,

Amelia Nanda Sari, S.H., M.H.

Edo Sandra Wijaya, S.H., M.H



FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jl Zainal Abidin Pagar Alam No 02 Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322 107



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Terhadap
LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr, Wb,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Om Swati Astu Namu Budaya
Tabik Pun.....

Yang Terhormat ;

- Sdr. Bupati Lampung Selatan ;
- Sdr. Wakil Bupati Lampung Selatan ;
- Pimpinan sidang dan rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Selatan ;
- Sdr. Para Staf Ahli Bupati Lampung Selatan ;
- Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten;
- Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Kantor serta para Camat di lingkungan Kabupaten Lampung Selatan;
- Sdri. Ketua TP. PKK, Dharma Wanita dan Organisasi Wanita seKabupaten Lampung Selatan;
- Pimpinan Partai Politik dan Ormas se Kabupaten Lampung Selatan;
- Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat;
- Sdr. Rekan-rekan Jurnalis baik Cetak maupun Elektronik serta hadirin undangan yang kami hormati.

MERDEKA ...

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Penyampaian **Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.**

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW hingga akhir zaman...amiin

Pimpinan sidang, Saudara Bupati, serta hadirin yang berbahagia;

Setelah menyimak Pembacaan **Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026** tersebut diatas MENYETUJUI dan mengapresiasi karena rapat telah mengakomodir usulan Fraksi baik selama dalam Pembahasan dan terakomodir dalam Ranperda **APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026** diantaranya :

- ✕ ~~Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)~~ telah transparansi dalam hal rincian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama pembahasan Ranperda **APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026** dalam rangka untuk mengevaluasi keadilan pengalokasian anggaran.

- Ranperda **APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026** telah mengakomodir nasib Honorer Non Database sejumlah **259** orang tenaga honorer untuk dianggarkan dan mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah.

Maka dengan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Dengan Mengucap Bismilahirrohmanirohim Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kab Lampung Selatan **Menyetujui** Penandatanganan Bersama terhadap **RANPERDA** tersebut dan **disahkan** menjadi **PERDA**.

Pimpinan sidang, Saudara Bupati, serta hadirin yang berbahagia;

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dapat kami sampaikan, mohon maaf jika dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Merdeka.....!!!

Wabillahitaufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kalianda , 26 Nopember 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Periode 2024 - 2029**

Ketua



HENDRY GUNAWAN



Sekretaris



ASMARA, S.Pd

**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DISAMPAIKAN PADA :

**RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD KAB. LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

PANDANGAN AKHIR FRAKSI GOLONGAN KARYA

(F-GOLKAR)

DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DALAM RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG APBD KAB. LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2026

Yth. Bupati Lampung Selatan.

Yth. Wakil Bupati Lampung Selatan.

Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor di Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Para Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Pimpinan Parpol, Akademisi, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Ormas, Insan Pers di Kabupaten Lampung Selatan.

Para hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamualaikum Wr. Wb

***Selamat Siang, Salam Sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu,
NamoBudaya, Salam Kebajikan. Tabik Puun...***

Puji Syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, atas kehendak dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kab. Lampung Selatan pada Hari Rabu, 26 November 2025 dengan keadaan sehat walafi'at. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta pegikutnya hingga akhir jaman *Aamiin Yarabbal Alamin*.

Kepada Pimpinan Rapat kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan Pandangan Akhir Pengambilan Keputusan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Yth. Bupati Lampung Selatan.

Rapat Pripurna Dewan Yth.

Para hadirin undangan yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada hari ini adalah sebagai bentuk tindak lanjut pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Lampung Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025, lalu dilanjutkan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Lampung Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 19 sampai dengan 25 November 2025.

Proses tersebut tentu melewati dinamika, diskusi dan perdebatan yang cukup panjang dan melelahkan. Namun, semuanya merupakan bagian dari komitmen kita semua sebagai wakil rakyat khususnya Fraksi Partai Golkar dalam memastikan bahwa, setiap kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada

Rapat Pripurna Dewan Yth.

Para hadirin undangan yang kami hormati.

Dengan mempertimbangkan hasil pembahasan, serta berdasarkan pada kepentingan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim..* Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Lampung Selatan menyatakan

MENERIMA dan MENYETUJUI

Laporan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kab. Lampung Selatan atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Lampung Selatan Tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

(3)

Yth. Bupati Lampung Selatan.

Rapat Pripurna Dewan Yth.

Para hadirin undangan yang kami hormati.

Demikian Pandangan Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Lampung Selatan yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi kontribusi positif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Apabila dalam pembahasan terdapat hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wabillahitaufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kalianda, 26 November 2025

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,



H. SIDIK MARYANTO, S.Sos

SEKRETARIS,



DERRI KUSUMA, S.E

**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



DISAMPAIKAN :

**DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA**

**PENGESAHAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BLANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026.**

KALIANDA, 26 NOVEMBER 2025



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No.02 Kalianda Lampung Selatan



PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan
- Yth, Sdr. Pimpinan Paripurna dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan beserta seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Sdr Pj. Sekretaris DPRD Lampung Selatan
- Yth, Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Badan
- Yth, Sdr. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Sdri. Ketua TP. PKK, Dharma Wanita dan Organisasi Kewanitaan Se-Kabupaten Lampung Selatan
- Yth, Pimpinan Media Massa, serta rekan-rekan insan Pers, baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Tabik Puun....

Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka Rapat Paripurna Pengesahan RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan Kepada Junjungan Alam Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga Yaumul Kiamat, Aamiin Ya Robbal Aalamin.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang Paripurna yang berkenan memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional untuk menyampaikan Pandangan Umum mengenai Pengesahan RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

----- Paripurna Dewan Yang Terhormat -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

----- Paripurna Dewan Yang Terhormat -----

Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, karena Kepala Daerah selaku pengendali Pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan layanan dasar, kesejahteraan masyarakat, serta melakukan pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur dan peningkatan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pembiayaan-pembiayaan yang harus dibuat dan dirancang sebagai dasar dan acuan dalam mencapai dan mengoptimalkan program maupun kegiatan sebagai bagian umum pelayanan pemerintahan daerah.

----- Paripurna Dewan Yang Terhormat -----

Dengan mengucapkan Bismillahiromannirohim...

Kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional Menyetujui Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Lampung Selatan ini kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah SWT kami mohon ampun.

Wabillahaufik wal hidayah,

Wasallammu'alaikum, Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kalianda, 26 November 2025

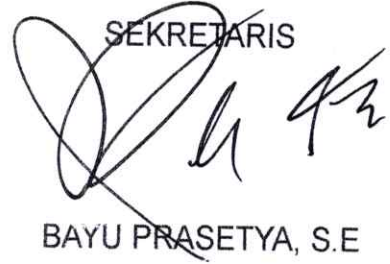
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA


AGUS SARTONO, S.E



SEKRETARIS


BAYU PRASETYA, S.E

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PKB**



**TERHADAP RANPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**LAMPUNG SELATAN
26 NOVEMBER 2025**



**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Alamat Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.02 Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322107



**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PKB DPRD KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

-
- Yth Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan beserta segenap jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Pimpinan Rapat serta Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr/i. Ketua TP. PKK, Ketua Dharma wanita dan organisasi wanita se-Kabupaten Lampung Selatan, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Kaum Akademisi, Para Tenaga Ahli Fraksi, Pimpinan Media Massa serta Rekan-rekan Insan Pers baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Selamat Siang dan Salam sejahtera untuk kita

semua Tabiiik Puuuun.....

Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita. Dengan demikian, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 pada hari ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi di hadapan Dewan yang terhormat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan untuk kepentingan masyarakat Lampung Selatan, khususnya.

Hadirin Sidang Paripurna Yang Terhormat

Setelah mencermati laporan hasil pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD, maka kami ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran dari Fraksi PKB sebagai berikut;

1. Fraksi PKB mengapresiasi kerja Badan Anggaran DPRD bersama TAPD dan seluruh OPD yang telah melakukan pembahasan intensif selama 19–25 November 2025, sehingga dapat menghasilkan penyempurnaan komposisi APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.
2. Fraksi PKB menekankan bahwa alokasi anggaran pada **pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur** harus benar-benar menjadi prioritas utama sebagaimana juga disarankan Banggar. Kami meminta agar seluruh program pelayanan dasar dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, dan mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat.
3. Fraksi PKB mendukung langkah peningkatan PAD dengan catatan:
 - Penetapan target PAD harus **realistis, terukur, dan berbasis data**,
 - Penguatan digitalisasi basis data pendapatan,
 - Optimalisasi kinerja BUMD
 - Penegakan regulasi dan pengawasan lapangan untuk mengurangi kebocoran.Fraksi PKB menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh membebani masyarakat kecil, tetapi harus menyasar sektor potensial, ekonomi kreatif, pariwisata, serta pembenahan tata kelola BUMD.

4. Dengan dinamika ekonomi nasional saat ini, Fraksi PKB berharap agar Pemerintah Daerah Memperluas program pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil, Memperkuat program penanggulangan kemiskinan, Meningkatkan respons cepat terhadap bencana dan kerentanan sosial.
5. Fraksi PKB menyadari bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Sebagai Kabupaten besar yang terus berkembang, Kabupaten Lampung Selatan harus mampu memanfaatkan potensi pendapatan daerah secara maksimal dan mengelolanya secara efisien agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
6. Fraksi PKB mendukung penuh R-APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun Anggaran 2026. Namun, Fraksi PKB juga akan terus mengawal pelaksanaannya agar benar – benar sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Hadirin sidang Paripurna yang Terhormat

Dengan memperhatikan struktur APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi PKB **Menerima dan Menyetujui** Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Demikian Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKB DPRD Kabupaten Lampung Selatan, akhirnya apabila ada kata-kata dalam penyusunan kalimat yang kurang berkenan dihati para hadirin sekalian, atas nama Fraksi kami mohon maaf.

Wallahulmuafiq ila Aqwamithoriq.

Wassalamualaikum wr.wb.

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026



DALAM RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

26 NOVEMBER 2025



FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 02 Kalianda Lampung Selatan
Telp. (0727) 322107



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI DEMOKRAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Yth. Sdr. Bupati Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Wakil Bupati Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat dan rekan-rekan Anggota DPRD Kab Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Para Asisten dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Kepala Dinas / Instansi / Badan dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Yth. Sdr. Ketua TP. PKK, Dharma wanita dan organisasi wanita se-Kabupaten Lampung Selatan

Yth. Sdr. Insan Pers baik cetak maupun elektronik serta hadirin undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Selamat Siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Tabik Puun.....

Syukur Alhamdulillah kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, kita dapat kembali bersama-sama dan bersilaturahmi untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Fraksi Partai Demokrat telah mencermati, membahas, dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan

Tahun Anggaran 2026 melalui seluruh mekanisme pembahasan bersama TAPD dan komisi-komisi.

Setelah memperhatikan struktur pendapatan, belanja, serta pembiayaan, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa catatan:

1. Aspek Pendapatan Daerah

Kami mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi layanan, peningkatan kualitas tata kelola, serta perluasan basis pajak tanpa membebani masyarakat kecil.

2. Prioritas Belanja Daerah

Fraksi Demokrat menekankan agar APBD 2026 benar-benar diarahkan pada program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama:

- a. peningkatan kualitas pendidikan,
- b. pemerataan layanan kesehatan,
- c. pembangunan infrastruktur dasar,
- d. penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM, serta
- e. mitigasi bencana dan penanggulangan kemiskinan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Kami meminta pemerintah daerah menjaga prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, serta memperkuat fungsi pengawasan internal agar program berjalan tepat sasaran.

4. Penguatan Desa dan Sektor Kebudayaan

Lampung Selatan memiliki kekayaan adat dan budaya yang harus didukung. Fraksi Demokrat mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk desa adat, pelestarian budaya, dan pengembangan pariwisata daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan, masukan, dan koreksi yang telah dilakukan, dengan mengucap **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** Fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Demokrat kami sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban amanah pembangunan daerah.

Fraksi Partai Demokrat

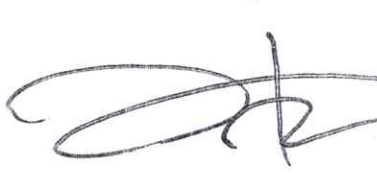
DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Kalianda, 26 November 2025

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Ketua,

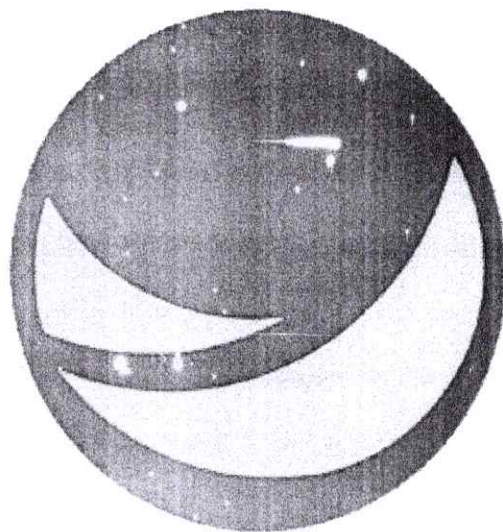
Sekretaris



FITRI PURWANTI S.T.,M.T



ACHMAD JOHANI A.Md



Partai NasDem

GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NasDem DPRD LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANPERDA
APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**LAMPUNG SELATAN
26 NOVEMBER 2025**



FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Alamat Jl.Zainal Abidin Pagar Alam No.02 Kalianda Lampung Selatan
Telp.(0727) 322 107



PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RANPERDA
APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- Yth Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan beserta segenap jajaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Pimpinan Rapat serta Rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr. Sekda / Asisten / Staf Ahli Bupati.
- Yth. Sdr/i. Kepala Dinas / Instansi dan Camat di Kabupaten Lampung Selatan.
- Yth. Sdr/i. Ketua Ormas, Ketua TP. PKK, Ketua Dharma wanita dan organisasi wanita se-Kabupaten Lampung Selatan, serta Rekan-rekan Insan Pers baik cetak maupun elektronik dan hadirin undangan yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Wr, Wb,

Salam sejahtera untuk kita semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Tabiik Puuuun.....

Salam RESTORASI !!!

Marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur atas anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kesehatan dan kesempatan-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pembacaan Laporan Badan Anggaran Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi NasDem untuk menyampaikan Pendapat Akhir di hadapan Sidang Paripurna yang terhormat. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat Lampung Selatan secara umum.

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Rapat serta para hadirin yang kami hormati

Menindaklanjuti Penyampaian Laporan Badan Anggaran Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, izinkan kami menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam bentuk catatan serta saran sebagai kontribusi untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.

1. Kami menyampaikan apresiasi atas kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang telah melaksanakan tugasnya dalam membahas dan menyusun Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 bersama perangkat daerah atau OPD yang telah sesuai dengan ketentuan serta Peraturan yang berlaku.
2. Fraksi NasDem memberikan beberapa Saran dan masukan dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, yaitu:
 - a. Prioritas Belanja: Pemerintah Daerah harus tetap menjaga prioritas alokasi belanja pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik, dengan prinsip bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Peningkatan PAD: Mendorong Optimalisasi Peningkatan Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih realistis dan terukur, untuk menyeimbangkan kebutuhan Belanja Daerah di tengah penyesuaian transfer dari Pemerintah Pusat.
 - c. Strategi PAD: Memperkuat basis data dengan teknologi digitalisasi, menggali potensi PAD dari BUMD, mengembangkan sektor pariwisata, menumbuhkembangkan UMKM, merevisi regulasi yang sesuai, dan melakukan pengawasan lapangan yang ketat untuk mengantisipasi kebocoran.

Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Rapat serta para hadirin yang kami hormati.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi ini kami sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama Fraksi. Selanjutnya (dengan mengucap *Bismillahhirohmannirohim*), Fraksi NasDem DPRD

Kabupaten Lampung Selatan menyatakan *Menerima dan Menyetujui* Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026 untuk dijadikan Perda. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya yang kita lakukan senantiasa membawa kebaikan dan kemajuan bagi masyarakat dan daerah yang kita cintai bersama.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Shalom

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Namo budhaya

Salam Kebajikan

Lampung Selatan, 26 November 2025

**PIMPINAN FRAKSI NasDem
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA,




M.GILANG SATRIA RIANDY,SE.,MM.

SEKRETARIS,


POLMAN SINAGA,S.H.



**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI PKS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TERHADAP
PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Assalamualaikum wr.wb

Tabik pun...

Yang Kami Hormati Pimpinan DPRD beserta Anggota DPRD kabupaten Lampung Selatan.

Yang Kami Hormati Saudara Bupati dan Wakil bupati, beserta seluruh jajaran Eksekutif kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Unsur-Unsur Forkopimda kabupaten Lampung Selatan

Yang Kami Hormati Pimpinan Partai Politik, Ormas, Akademisi, LSM, Rekan-Rekan Pimpinan Media Massa baik Cetak maupun Elektronik Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh undangan yang berbahagia.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan sidang yang berkenan memberikan waktu kepada kami guna menyampaikan pandangan akhir fraksi pada kesempatan ini.

Hadirin peserta Sidang yang berbahagia.



Mengawali pandangan akhir Fraksi ini, kami Fraksi PKS mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Badan Anggaran DPRD Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Selatan yang telah membahas Rancangan Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026 dengan baik.

Setelah menyimak penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Anggaran, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam pandangan akhir fraksi ini, antara lain :

Pertama ,

Fraksi PKS memahami langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait Penataan Anggaran APBD Tahun 2026 akibat turunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 17,68 % atau senilai Rp. 333.246.354.000 (*Tiga ratus tiga puluh tiga miliar, dua ratus empat puluh enam juta, tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*) yang mengakibatkan hampir semua OPD mengalami rasionalisasi turunnya anggaran sebesar rata-rata 30%.

Dalam hal ini, Fraksi PKS memberikan catatan bahwa penurunan anggaran program dan kegiatan OPD harus tetap memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD. Sehingga semangat efisiensi dan rasionalisasi terkait turunnya TKD tetap memperhatikan kualitas kinerja, efektivitas program- kegiatan serta kesesuaian dengan RPJMD dan visi misi Bupati Wakil Bupati 2025-2030.



KEDUA,

Terkait turun secara signifikan TKD Tahun 2026, Fraksi PKS juga mencermati *Mandatory Spending* atau Belanja Wajib yang harus ditunaikan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no. 24 tahun 2024.

1. Fraksi PKS mengapresiasi Pemkab Lampung Selatan yang mengalokasikan Belanja Wajib Pendidikan sebesar 45,34% dari kewajiban minimal 20%. Tingginya Anggaran Belanja Pendidikan ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan dan Guru, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Lampung Selatan.
2. Fraksi PKS memberikan catatan kritis terhadap Belanja Pegawai yang masih melebihi mandatory spending 30% yakni sebesar 31.72 %. Fraksi PKS memandang Belanja Pegawai yang sangat memadai ini diharapkan menjadi penyemangat peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terutama dalam meraih target Pendapatan Asli Daerah dan pencapaian target kinerja program-kegiatan OPD, serta semakin optimalnya pelayanan publik untuk masyarakat Lampung Selatan.

Hadirin Sidang Paripurna yang terhormat



KETIGA, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting terkait Penataan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sebagai berikut:

1. TPP harus disusun berdasarkan asas keadilan, proporsionalitas, serta keselarasan antara beban kerja dan tanggung jawab setiap jabatan. Fraksi PKS menekankan pentingnya memastikan seluruh pegawai memperoleh perlakuan yang adil sesuai kontribusinya.
2. Fraksi PKS mendorong dilakukannya peninjauan kembali struktur TPP, untuk meminimalisir ketimpangan ekstrem antara jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Kesenjangan yang terlalu lebar berpotensi mengganggu motivasi dan harmonisasi kerja di internal OPD.
3. Fraksi PKS meminta Pemerintah Daerah menerapkan standar perhitungan TPP yang seragam dan objektif. Hal ini untuk mencegah disparitas besar antara OPD tanpa dasar yang jelas, sehingga penetapan TPP lebih transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. TPP harus mengacu pada indikator kinerja yang terukur, tingkat disiplin pegawai, capaian program, serta beban kerja aktual masing-masing OPD. Fraksi PKS juga menegaskan bahwa TPP tidak boleh menjadi beban keuangan semata, tetapi harus mendorong peningkatan produktivitas, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi.



Terakhir, Fraksi PKS juga memberikan catatan kritis terkait *Mandatory Spending* atau Belanja Wajib Belanja Infrastruktur Publik yang baru tercapai 28,38% dari amanah PMK minimal sebesar 40%. Fraksi PKS mencermati turunnya prosentase Belanja Infrastruktur Publik yang disebabkan oleh turunnya TKD, tentu saja akan sangat mempengaruhi besaran alokasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur di 17 kecamatan Lampung Selatan. Maka dalam hal ini Fraksi PKS mengharapkan peran aktif dan inisiatif Anggota DPRD, Bupati dan wakil Bupati, serta Organisasi Perangkat Daerah untuk semakin proaktif berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka mengakses program dan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi untuk diturunkan di Lampung Selatan.

Hadirin peserta sidang paripurna yang berbahagia ...
Dalam hal turunnya Belanja Infrastruktur Publik APBD Tahun 2026 dibanding Tahun 2025 ini, Fraksi PKS juga memohon maaf dan kemakluman kepada masyarakat Lampung Selatan, serta Fraksi PKS berkomitmen akan terus menjalin komunikasi, koordinasi dan berkolaborasi dengan Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPR RI dalam rangka mengakses program-kegiatan pusat dan provinsi untuk menambal kekurangan Belanja Infrastruktur Publik APBD Tahun 2026.



Hadirin Sidang Paripurna yang kami hormati,
Demikianlah PANDANGAN AKHIR FRAKSI PKS ini kami sampaikan, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PKS menerima dan menyetujui Pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk dijadikan Perda APBD.

Akhirulkalām, mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah senantiasa memberkahi kerja-kerja kita membangun Lampung Selatan, serta senantiasa mencurahkan taufiq dan hidayahnya kepada kita agar kita mampu mewujudkan Lampung Selatan kedepan, menjadi Lampung Selatan yang ADIL SEJAHTERA *baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Amin ya Rabbal Alamin.*

Wassalamualaikum wr.wb

Kalianda, 26 November 2025

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Lampung Selatan


DEDE SUHENDAR, M.Pd
Sekretaris


BOWO EDY ANGGORO, S.E
Ketua



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 29 /DPRD-LS/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan : 1. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Tanggal 26 November 2025;

- a. Fraksi Gerindra..... (Terlampir)
- b. Fraksi PDI-Perjuangan..... (Terlampir)
- c. Fraksi Partai Golkar..... (Terlampir)
- d. Fraksi PAN..... (Terlampir)
- e. Fraksi PKB (Terlampir)
- f. Fraksi Partai Demokrat..... (Terlampir)
- g. Fraksi Partai NasDem..... (Terlampir)
- h. Fraksi PKS..... (Terlampir)

2. Hasil musyawarah dan Mufakat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Rapat Paripurna Tanggal 26 November 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026;**

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut;

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.102.681.012.612,00
b. Belanja Daerah	Rp. 2.204.448.012.612,00
Surplus (defisit)	Rp. (101.767.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 125.000.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 23.233.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 101.767.000.000,00
SILPA	Rp. 0,00

KETIGA : Memberikan kepercayaan kepada Bupati Lampung Selatan untuk melaksanakan Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

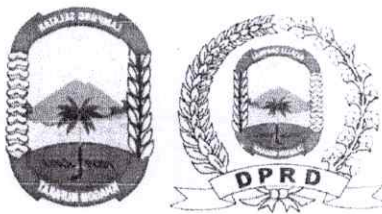
Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal November 2025

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**


ERMA YUSNELI

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Teluk Betung
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda



BERITA ACARA

Nomor : 8/PB/HK / 2025

Nomor : 17 /PB/DPRD-LS/2025

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI LAMPUNG SELATAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kalianda dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RADITYO EGI PRATAMA** : Bupati Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang beralamat di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 1 Kalianda, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **a. ERMA YUSNELI** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. MERIK HAVIT** : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- c. BENNY RAHARJO** : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- d. BELLA JAYANTI** : Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** telah membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas, disimpulkan dengan hasil sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 2.102.681.012.612,00
b. Belanja Daerah	Rp. 2.204.448.012.612,00
Surplus (defisit)	Rp. (101.767.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
- Penerimaan Pembiayaan	Rp. 125.000.000.000,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 23.233.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 101.767.000.000,00
SILPA	Rp. 0,00

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang telah disetujui bersama, sebagaimana angka 1 (satu) diatas, disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Gubernur Lampung untuk mendapat pengesahan, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalianda, 26 November 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA

ERMA YUSNELI
WAKIL KETUA I

MERIK HAVIT

WAKIL KETUA II

BENNY RAHARJO

WAKIL KETUA III

BELLA JAYANTI



BUPATI LAMPUNG SELATAN

SAMBUTAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
DPRD TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

RABU, 26 NOVEMBER 2026
=====

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang terhormat :

- Wakil Bupati Lampung Selatan;
- Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Forkopimda;
- Sekretaris Daerah beserta jajaran;
- para Camat;
- serta para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.

Yang saya banggakan :

- Ketua Tim Penggerak PKK;
- Ketua Dharma Wanita Persatuan;
- Rekan-rekan insan pers, dan seluruh hadirin yang berbahagia.

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syaloom,
Ohm swastiastu,
Namo budhaya,
Salam kebajikan.
Tabikpun...***

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya, kita kembali dipertemukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan, forum yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi ruang untuk meneguhkan komitmen, keberanian, dan tanggung jawab bersama dalam menata masa depan Lampung Selatan.

Sidang dewan yang terhormat,

Rapat Paripurna ini memiliki arti strategis bagi perjalanan pembangunan daerah. Forum ini menjadi instrumen penting untuk menjaga agar kompas pembangunan tetap tepat arah, tepat tujuan, dan tepat keberpihakan.

Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas kolaborasi yang terus terjaga, juga kepada Forkopimda, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, Camat, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang selalu berkontribusi dalam proses demokrasi daerah.

Rapat hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 27 Oktober 2025, serta berlandaskan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan dasar hukum tersebut, penyusunan APBD 2026 dituntut untuk akuntabel, terukur, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sidang dewan yang terhormat,

APBD bukan sekedar dokumen anggaran, tetapi wujud pilihan moral dan peta prioritas pembangunan. Tahun Anggaran 2026 merupakan fase yang krusial. Kita menghadapi percepatan pembangunan, tuntutan pemerataan layanan publik, transformasi digital, serta penguatan daya saing daerah. Oleh karena itu, setiap program harus berbasis data, berbasis kebutuhan riil, dan menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kita juga menyadari sejumlah tantangan yang harus kita jawab bersama :

1. Ketimpangan antar wilayah yang menuntut pemerataan infrastruktur dasar;
2. Penguatan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, yang perlu dukungan berkelanjutan;
3. Reformasi pelayanan publik yang harus lebih cepat, pasti, dan transparan;

4. Perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian dan kerentanan wilayah; serta
5. Kapasitas fiskal yang terbatas, sehingga menuntut efisiensi dan fokus prioritas.

Dalam dinamika nasional dan global yang terus berubah, APBD 2026 harus mampu menjawab isu strategis :

- **Transformasi digital layanan publik**, agar birokrasi lebih cepat dan kredibel;
- **Stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat**, melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM;
- **Pemerataan infrastruktur dasar**, sebagai wujud keadilan pembangunan;
- **Investasi pada SDM unggul**, melalui peningkatan mutu pendidikan dan literasi digital;
- **Penguatan tata kelola keuangan daerah**, dengan perencanaan yang akurat dan pengawasan yang ketat.

Sidang dewan yang terhormat,

Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekedar keputusan administratif. Ini adalah keputusan strategis yang menentukan arah pembangunan Lampung Selatan. Setiap program harus hadir sebagai kenyataan di lapangan, hadir dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan kepada kita dalam menjalankan amanah ini.

Terima kasih atas perhatian, kebersamaan, dan kontribusi seluruh pihak.

Wallohu muwafik illa qoumithoriq,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti om,

Namo budhaya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

RADITYO EGI PRATAMA, ST.,MBA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

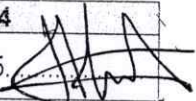
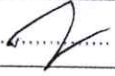
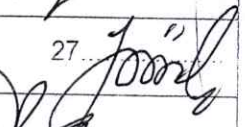
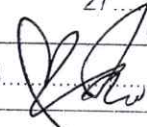
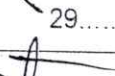
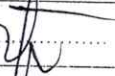
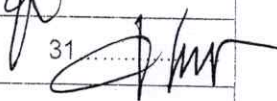
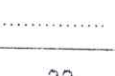
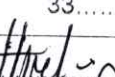
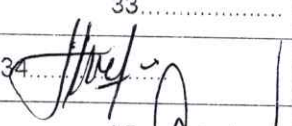
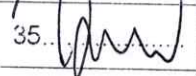
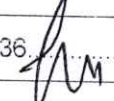
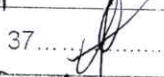
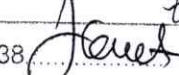
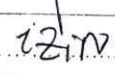
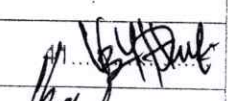
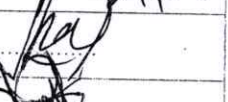
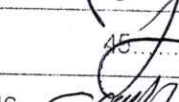
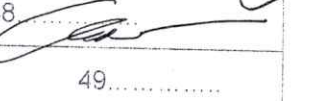
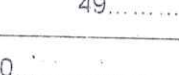
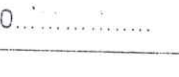
DAFTAR HADIR

Hari : RABU

Tanggal : 26. NOVENBER 2008

Acara : Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan DPRD
terhadap Rancangan APBD LS T.A 2009

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ERMA YUSNELI, SE., MM	KETUA DPRD KAB. LAMSEL	1. 12/11/08
2	MERIK HAVIT, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD KAB. LAMSEL	2. [Signature]
3	BENNY RAHARJO., SH	WAKIL KETUA DPRD KAB. LAMSEL	3. [Signature]
4	BELLA JAYANTI, S.I.Kom., M.B.A	WAKIL KETUA DPRD KAB. LAMSEL	4. [Signature]
5	AMELIA NANDA SARI, SH., MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	5. [Signature]
6	NUR ARIFIN, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	6. [Signature]
7	YUTI RAMAYANTI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	7. [Signature]
8	ALI WARNADA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	8. [Signature]
9	WARIS BASUKI, SH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	9. [Signature]
10	EDO SAPUTRA WIJAYA, SH., MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	10. [Signature]
11	DWI RIYANTO, SE., MM	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	11. [Signature]
12	FARIZAL PURBA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	12. [Signature]
13	ROSDIANA, SH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	13. 12/11/08
14	SUHAR PUJIANTO	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	14. [Signature]
15	TAMAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	15. UMRON
16	HENDRY GUNAWAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	16. [Signature]
17	ASMARA, S.Pd	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	17. [Signature]
18	SUPRIYATI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	18. [Signature]
19	SAMSUL H. SUHARTONO, S.Pd	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	19. [Signature]
20	AHMAD AL-AKHRAN., S.S	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	20. [Signature]
21	AHMAD MUSLIM AM, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	21. [Signature]
22	Hi. SIDIK MARYANTO, S.Sos	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	22. [Signature]
23	SYAIFUL AZUMAR, SH.,MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	23. [Signature]
24	PRAMADJI NADYAN INGGARJITO	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	24. [Signature]

1	2	3	4
25	DERI KUSUMA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	25. 
26	AGUS SARTONO, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	26. 
27	WIDODO	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	27. 
28	BAYU PRASETYA, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	28. 
29	HJ. RUSDIANTI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	29. 
30	EDI WALUYO, ST	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	30. 
31	SUTAJI ABDULLAH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	31. 
32	HAMDANI, S.H.I	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	32. 
33	HERLIZA, A.Md	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	33. 
34	MISMAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	34. 
35	ISMAIL, SE., MM	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	35. 
36	YUDI PRAYOGA	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	36. 
37	JENGGIS KHAN HAIKAL, SH., MH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	37. 
38	ACHMAD JOHANI, A.Md	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	38. 
39	KODRI	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	39. 
40	AYU KUMALA SARI, SH	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	40. 
41	FITRI PURWANTI, ST., MT	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	41. 
42	SUHADIRIN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	42. 
43	POLMAN SINAGA	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	43. 
44	SLAMET NURIMAN	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	44. 
45	M. GILANG SATRIA RIANDY, SE., MM	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	45. 
46	YULIDA NANDAR LAILA	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	46. 
47	BOWO EDY ANGGORO, SE	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	47. 
48	DEDE SUHENDAR, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	48. 
49	KASMANI, ST., M.Si	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	49. 
50	IMAM ROHADI, S.Hut	ANGGOTA DPRD KAB. LAMSEL	50. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KETUA,



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR : UNDANGAN RAPAT PARIPURNA.....
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
UNTUK SEKRETARIAT KAB. LAMPUNG SELATAN

HARI : Rabu

TANGGAL : 26 - NOV - 2025

TENTANG :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Concoro	DANDIM 0421 LAMPUNG SELATAN	1.
2.	Nyoman y	KAPOLRES LAMPUNG SELATAN	2.
3.	Dekah Dirgan S	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA LAMPUNG SELATAN	3.
4.		KETUA PENGADILAN NEGERI KALIANDA LAMPUNG SELATAN	4.
5.		KETUA PENGADILAN AGAMA KALIANDA LAMPUNG SELATAN	5.
6.		KA. LAPAS KELAS II KALIANDA LAMPUNG SELATAN	6.
7.		KA. IMIGRASI KELAS III KALIANDA LAMPUNG SELATAN	7.



DAFTAR HADIR :UNDANGAN RAPAT PARIPURNA
(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kallanda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635 Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR :UNDANGAN RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
HARI: RABU
TANGGAL: 26 - NOV - 2025
TENTANG:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Syamsund	SEKRETARIS KABUPATEN	1.
2.	Ingi	ASSISTEN BID. PEMERINTAHAN	2.
3.		ASSISTEN BID. EKONOMI & PEMBANGUNAN	3.
4.		ASSISTEN ADMINISTRASI UMUM	4.
5.		STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK	5.
6.	Yang M	STAF AHLI BID. EKONOMI, PEMBANGUNAN & KEMASYARAKATAN	6.
7.		STAF AHLI BID. KEUANGAN	7.
8.	Sebransyah	KABAG TATA PEMERINTAHAN	8.
9.	M-Ali	KABAG KERJASAMA	9.
10.		KABAG ORGANISASI	10.
11.		KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	11.
12.		KABAG SUMBER DAYA ALAM	12.
13.		KABAG UMUM	13.
14.	Finmasyah	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.
15.		KABAG PENGADAAN BARANG & JASA	15.
16.	ROSE RESNIDA	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	16.
17.	MARLENA	KABAG PEREKONOMIAN	17.
18.	Orumolu	KABAG HUKUM	18.
19.		KABAG PERENCANAAN KEUANGAN	19.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

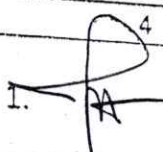
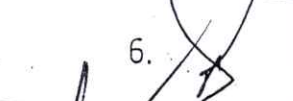
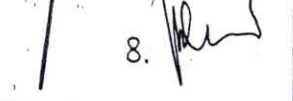
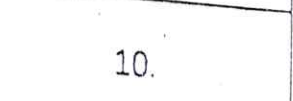
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

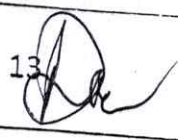
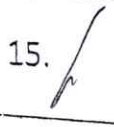
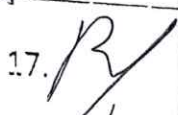
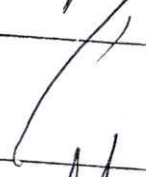
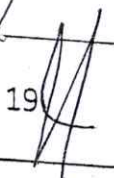
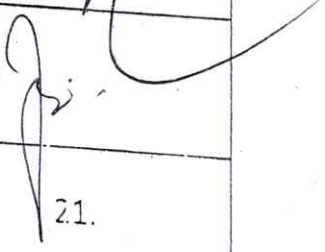
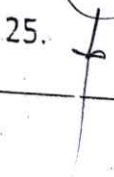
Jalan Zainal Abidin Pagaram No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax. (0727) 322107

DAFTAR HADIR UNDANGAN RAPAT PARIPURNA.....

DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

HARI : PABU
TANGGAL : 26 - NOV - 2025
ACARA :
TEMPAT :
.....

NO	NAMA	DINAS/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		DINAS KESEHATAN	1. 
2.	LELI ARYANI	RSUD BOB BAZAR	2. 
3.	Jupri	DINAS SOSIAL	3. 
4.	Ingi Inom	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	4. 
5.	Badom2222	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5. 
6.	A.C Hept. B	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6. 
7.	Rahmal A	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	7. 
8.	Zulvira Ratnasari	DINAS KETAHANAN PANGAN	8. 
9.	Dari Jermiah	DINAS PERIKANAN	9. 
10.	Ckpu	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10. 
11.	Heri - W	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11. 

12.	<i>Aryantoni</i>	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	12. 
13.	<i>Devil. Aminda</i>	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13. 
14.	<i>Rina aronh</i>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	14. <i>RF</i>
15.	<i>Bugant</i>	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15. 
16.	<i>Erfanda Nesen</i>	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16. 
17.	<i>Rika wati</i>	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	17. 
18.		DINAS PERHUBUNGAN	18. 
19.	<i>M. Darmawan</i>	DINAS PENDIDIKAN	19. 
20.		DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAL & PERKEBUNAN	20. 
21.	<i>Rina Gizi</i>	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	21. 
22.		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	22.
23.		DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	23.
24.	<i>M. Darmawan</i>	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	24. 
25.	<i>M. Supri</i>	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	25. 
26.		BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT LAMPUNG SELATAN	26.
27.		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.
28.	<i>M. Hartono</i>	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	28. 
29.		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.

30.	<i>MRTO</i>	BADAN PENGELOLA PAJAK & RETRIBUSI DAERAH	30.	<i>[Signature]</i>
31.		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	31.	
32.	<i>Arya</i>	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	32.	<i>[Signature]</i>
33.		INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	33.	
34.	<i>M. H. M. M.</i>	SATUAN POL PP	34.	<i>[Signature]</i>
35.		SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI	35.	
36.		KETUA KPU LAMPUNG SELATAN	36.	
37.		SEKRETARIS KPU LAMPUNG SELATAN	37.	
38.		KEMENTERIAN AGAMA	38.	
39.		BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39.	
40.		DARMAWANITA PERSATUAN LAMPUNG SELATAN	40.	
41.		PKK LAMPUNG SELATAN	41.	
42.		PLN RANTING KALIANDA LAMPUNG SELATAN	42.	
43.		PDAM TIRTAYASA LAMPUNG SELATAN	43.	
44.		KWARCAP LAMPUNG SELATAN	44.	
45.		BPS LAMPUNG SELATAN	45.	
46		BUMD	46.	
47		BAWASLU	47.	
48	<i>M. H. M. M.</i>	BPN		<i>[Signature]</i>



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 02 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp (0727) 322105, 322106, 322107, 322287, 322635, Fax (0727) 322107

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Hari : Rabu
Tanggal : 28 NOV - 2025
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Ruri aplaner	KALIANDA	1
2	MUKHTAR	RAJABASA	2
3	SYAEFULLAH	PENENGAHAN	3
4	Rosalina	PALAS	4
5	ALFANIZAN	BAKAUHENI	5
6	Sri mahendra	KETAPANG	6
7	Wayan Susanto	SRAGI	7
8	R. Marmarga	WAY PANJI	8
9	Fian Sri Agung	SIDOMULYO	9
10	Sumiyadi SE	CANDIPURO	10
11	Fitri Hidayat	WAY SULAN	11
12	Andi	KETIBUNG	12
13	Rini	MERBAU MATARAM	13
14	HERI . P	TANJUNG BINTANG	14
15	HANDONO Susilo	TANJUNG SARI	15
16	MIZWAN	JATI AGUNG	16
17	Elco	NATAR	17

SUSUNAN ACARA

1. SKOR RAPAT DICABUT
2. PEMBACAAN LAPORAN BADAN ANGGARAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG APBD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026
3. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DPRD KAB. LAMPUNG SELATAN
4. KESIMPULAN RAPAT DAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA
5. SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
6. PENUTUP

Catatan : Pakaian

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| a. Bupati dan Wakil Bupati | : PSR + Peci |
| b. Anggota Dewan | : PSR + Peci |
| c. Undangan | |
| - Forkopimda | : PDH |
| - Sekda/ Asisten/ Staf Ahli Bupati | : PSR + Peci |
| - Dinas Instansi/ Camat | : PSR + Peci |
| - Ormas /TP. PKK/ DHARMA WANITA | : Seragam Org Masing-masing |



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 25 November 2025

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lampung Selatan tanggal 27 Oktober 2025 diantaranya menetapkan jadwal Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Ranperda Tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026, Untuk itu diharapkan kehadiran Bp/Ibu, Sdr/i, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 26 November 2025
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRD Kab.Lampung Selatan
Jalan Z.A. Pagaralam No. 02 Kalianda.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, Saudara/Saudari, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KETUA,

ERMA YUSNELI, S.E., M.M.